

**IMPLIKASI EKONOMI DAN SOSIAL MASYARAKAT  
PESISIR ATAS TURUNNYA HASIL TANGKAPAN  
LEMURU  
(Studi Kasus Masyarakat Pesisir Muncar Kabupaten  
Banyuwangi)**

**JURNAL ILMIAH**

**Disusun oleh :**

**Wingking Putra Pamungkas  
0710210061**



**JURUSAN ILMU EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG  
2013**

## LEMBAR PENGESAHAN PENULISAN ARTIKEL JURNAL

Artikel Jurnal dengan judul :

**IMPLIKASI EKONOMI DAN SOSIAL MASYARAKAT PESISIR ATAS  
TURUNNYA HASIL TANGKAPAN LEMURU  
(studi kasus Masyarakat Pesisir Muncar Kabupaten Banyuwangi)**

Yang disusun oleh :

Nama : Wingking Putra Pamungkas  
NIM : 0710210061  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Jurusan : S1 Ilmu Ekonomi

Bahwa artikel Jurnal tersebut dibuat sebagai *persyaratan ujian skripsi* yang dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 23 Januari 2013.

Malang, Januari 2013

Dosen Pembimbing,

**Dr. Sasongko, SE., MS.**

NIP. 19530406 198003 1 004

**IMPLIKASI EKONOMI DAN SOSIAL MASYARAKAT PESISIR ATAS TURUNNYA  
HASIL TANGKAPAN LEMURU  
(Studi Kasus Masyarakat Pesisir Muncar Kabupaten Banyuwangi)**

Winking Putra Pamungkas  
Sasongko  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya#  
Email: wingkingputra@gmail.com

**ABSTRAK**

Muncar merupakan kecamatan penghasil tangkapan ikan terbesar di Kabupaten Banyuwangi dan merupakan pelabuhan utama pendaratan ikan utama di Provinsi Jawa Timur. Sampai saat ini ikan pelagis khususnya ikan lemuru (*Sardinella Lemuru*) masih mendominasi hasil tangkapan nelayan sehingga tidak mengherankan jika industri-industri pengolahan ikan baik skala industri rumah tangga maupun industri besar berdiri di kawasan ini. Pada tahun 2009, total hasil tangkapan nelayan berjumlah 32.782 ton ikan dan untuk jenis ikan lemuru sendiri berjumlah 28.446 ton. Namun pada tahun 2010 hasil tangkapan nelayan menurun tajam dan hanya mampu mendaratkan ikan sebanyak 22.046.289 ton saja. Untuk jenis ikan lemuru pada tahun yang sama nelayan hanya mampu mendaratkan sebesar 17.718 ton saja dan terus mengalami penurunan setidaknya sampai tahun 2011. Penurunan hasil tangkapan ikan pada tahun-tahun tersebut tentu akan berdampak pada kondisi ekonomi dan sosial masyarakat pesisir yang notabene menggantungkan mata pencahariannya di sektor perikanan tangkap. Penelitian ini menjelaskan dampak yang ditimbulkan dari fenomena penurunan hasil tangkapan ikan kepada masyarakat pesisir khususnya mereka yang memanfaatkan pasokan ikan pelagis ikan lemuru maupun ikan pelagis lainnya sebagai mata pencahariannya seperti nelayan pandega penangkap lemuru dan pemindang. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dampak sosial yang berkaitan dengan upaya yang dilakukan masyarakat pesisir menyikapi penurunan hasil tangkapan ikan yang terjadi di Muncar baru-baru ini.

Kata kunci: Penurunan hasil tangkapan ikan, implikasi ekonomi dan sosial, dan upaya.

---

**A. LATAR BELAKANG**

Pemanfaatan sumber daya alam setelah adanya otonomi daerah diserahkan dan dipertanggung jawabkan kepada pemerintah daerah termasuk sumber daya kelautan yang bersifat lintas daerah. Perlu ada perhatian khusus mengenai sumber daya perikanan karena tidak adanya kejelasan batas wilayah sumber daya kelautan maka akan menyebabkan konflik kewenangan antar daerah. Selain dari batas wilayah kewenangan, sifat sumber daya alam kelautan yang *common property* menjadi permasalahan tersendiri dalam pemanfaatannya.

Selama ini sumber daya dengan sifat *common property* selalu memicu tindakan eksploitatif dalam pemanfaatannya mengingat ketidak-jelasan hak kepemilikan sehingga menimbulkan gejala yang disebut sebagai *dissipated resource rent*, yakni hilangnya rente sumber daya yang semestinya diperoleh dari pengelolaan sumber daya yang optimal. Dalam situasi dimana akses bersifat *quasi open access*, eksternalitas negatif akan mudah timbul yaitu dengan adanya *over fishing* jika terjadi pada sektor perikanan. *over fishing* sendiri diartikan sebagai penangkapan ikan yang melebihi jumlah kebutuhan untuk mempertahankan stok ikan suatu daerah tertentu (Fauzi, 2005).

Sebagai kabupaten yang memiliki garis pantai panjang yaitu sekitar 175,8 km dan berbatasan langsung dengan Selat Bali, Banyuwangi merupakan kabupaten penghasil ikan laut terbesar di Jawa Timur yaitu mencapai 51.371 ton pada tahun 2009. Kecamatan Muncar merupakan penyumbang utama hasil perikanan tangkap di kabupaten Banyuwangi yaitu 94,03% dari sebelas kecamatan penyumbang pendapatan asli daerah di sektor perikanan tangkap. Daerah penangkapan ikan nelayan Muncar sendiri pada dasarnya adalah perairan Selat Bali dengan luas total ±2.500 km<sup>2</sup> yang dibagi menjadi dua yaitu paparan Pulau Jawa dan Pulau Bali. Sebagai selat, perairan

Selat Bali memiliki pasokan ikan yang melimpah khususnya ikan lemuru yang mendominasi tangkapan nelayan Muncar yaitu  $\pm 80\%$  dari semua total hasil tangkapan ikan nelayan Muncar (Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banyuwangi, 2012).

Hasil tangkapan yang melimpah tersebut tidak terlepas dari banyaknya jumlah nelayan yang ada di Kecamatan Muncar. Sesuai dengan data Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi tahun 2011, jumlah nelayan yang ada di Kecamatan Muncar mencapai 14.624 orang yang terdiri dari 1.908 nelayan juragan dan 12.716 nelayan pandega. Nelayan juragan atau pemilik kapal adalah mereka yang mempekerjakan nelayan pandega di kapalnya. Masyarakat Muncar sendiri membagi nelayan juragan menjadi dua yaitu juragan darat dan laut. Juragan darat adalah pemilik kapal itu sendiri dan juragan laut adalah kapten kapal yang bertanggung jawab penuh atas hasil tangkapan kapal. Selanjutnya juragan laut dan nelayan pandega disebut sebagai kru laut yang bekerja berdasarkan instruksi dari juragan darat (pemilik kapal).

Ketidak-pastian yang ada di laut dan sifat sumber daya yang *common property* menyebabkan nelayan cenderung eksploitatif dalam memanfaatkannya. Hal ini yang menyebabkan *over fishing* di suatu perairan khususnya Selat Bali karena nelayan dalam melakukan tangkapan tidak memperhatikan bahkan mengenal adanya kapasitas lestari yang terkandung dalam suatu perairan itu sendiri. Kekhawatiran pihak-pihak akademisi menyangkut masalah tindakan *over fishing* yang dilakukan nelayan Muncar diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Purwaningsih et.al (2012).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Purwaningsih et.al pada tahun 2012 menunjukkan bahwa kegiatan *over fishing* yang dilakukan nelayan Muncar terjadi ketika El Nino tiba. Pada saat ini pasokan ikan *pelagis* khususnya lemuru meningkat sehingga terjadi peningkatan trip melaut nelayan dan menjadikannya sebagai musim tangkapan ikan. Nelayan cenderung berlomba-lomba melaut dan menguras pasokan ikan tanpa memperhatikan kapasitas lestari yang ada di perairan Selat Bali. Kegiatan *over fishing* yang dilakukan oleh nelayan selama ini akan menurunkan keberlanjutan ekonomi sektor perikanan di Selat Bali sehingga akan merugikan nelayan itu sendiri.

Setiyono dan Satmoko (2008) melihat penurunan hasil tangkapan ikan pada sudut pandang yang berbeda. Jika Purwaningsih melihat pada tindakan *over fishing* yang dilakukan nelayan, Setiyono dan Satmoko menelaah lebih lanjut potensi limbah industri yang terjadi di Muncar. Hasilnya adalah limbah industri baik skala rumah tangga maupun industri pembuangannya langsung di sungai. Pengendapan limbah yang terjadi selanjutnya menurunkan sanitasi air dikawasan ini maka akan berdampak pada sektor perikanan yang ada di Muncar.

Selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Purwaningsih et.al (2012) bahwa tindakan *over fishing* yang dilakukan oleh nelayan akan berdampak negatif pada nelayan itu sendiri. Hal ini terkait masalah waktu dan besarnya *input* yang digunakan untuk melaut. Nelayan pandega merupakan pihak yang terlibat langsung dalam proses penangkapan ikan di laut sehingga tenaga dan waktunya akan terkuras pada kegiatan tersebut. Sesuai teori ekonomi klasik bahwa bergesernya kurva penawaran ke sisi kiri (baca: menurunnya stok) maka akan menaikkan harga komoditi yang ditawarkan meskipun kurva permintaan tetap, begitu juga dengan hasil tangkapan nelayan di Muncar.

Ketika terjadi penurunan hasil tangkapan ikan di Muncar, harga komoditi ikan terus mengalami kenaikan bahkan untuk jenis ikan lemuru yang semula hanya Rp 2.000,- mencapai harga Rp 8.000,- per kg nya. Dengan adanya kenaikan harga tersebut seharusnya pendapatan nelayan khususnya nelayan pandega juga mengalami kenaikan namun pada kenyataannya tidak. Dari hasil wawancara dengan nelayan pandega, mereka mengeluhkan turunnya hasil tangkapan ikan berbanding lurus dengan pendapatan yang diterima.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi turunnya kegiatan di subsektor perikanan terhadap kondisi ekonomi dan sosial masyarakat pesisir khususnya kelompok masyarakat nelayan pandega kapal penangkap lemuru Muncar. Selain itu peneliti juga ingin mengetahui upaya masyarakat dan pemerintah daerah dalam menghadapi penurunan yang terjadi sehingga akan diperoleh saran dari peneliti khususnya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagai produsen kebijakan di Banyuwangi.

## B. KAJIAN PUSTAKA

### Sumber Daya (Dalam Perspektif Ekonomi)

Dalam literatur ekonomi sumber daya, pengertian atau konsep sumber daya didefinisikan cukup beragam. Ensiklopedia Webster misalnya, mendefinisikan sumber daya sebagai (Fauzi, 2004):

1. Kemampuan untuk memenuhi atau menangani sesuatu;
2. Sumber persediaan, penunjang atau bantuan;
3. Sarana yang dihasilkan oleh kemampuan atau pemikiran seseorang

Dalam pengertian umum, sumber daya didefinisikan sebagai sesuatu yang dipandang memiliki nilai ekonomi. Dapat juga dikatakan bahwa sumber daya adalah komponen dari ekosistem yang menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kebutuhan manusia. Rees (1990) dalam Fauzi (2004) mengatakan bahwa sesuatu untuk dapat dikatakan sebagai sumber daya harus memiliki dua kriteria, yaitu:

1. Harus ada pengetahuan, teknologi atau keterampilan untuk memanfaatkannya.
2. Harus ada permintaan terhadap sumber daya tersebut.

Jika kedua kriteria itu salah satunya tidak terpenuhi maka dianggap sebagai barang netral. Pengertian sumber daya sendiri dalam ilmu ekonomi sudah dikenal sejak lama. Adam Smith mendefinisikan sumber daya sebagai seluruh faktor produksi yang diperlukan untuk menghasilkan *output* (Fauzi, 2004).

### Deplisi Sumber Daya Alam

Deplisi sumber daya alam merupakan sebuah konsekuensi dari penggunaan sumber daya alam guna memenuhi kebutuhan dan kepuasan manusia. Deplisi sendiri mempunyai arti pengurangan sumber daya secara besar-besaran. Pada tingkat mikro (rumah tangga) deplisi berarti usaha untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun pada tingkat makro (negara) deplisi merupakan suatu cara untuk mempercepat proses pertumbuhan dan pembangunan yang lebih tinggi khususnya pada negara sedang berkembang yang memiliki tingkat pembangunan rendah. Sumber daya alam sebagai salah satu faktor ekonomi yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi pada akhirnya harus ter-eksploitasi demi kepentingan ekonomi yang cenderung kurang memperhatikan kelestariannya (Sutikno dan Maryunani, 2006).

Bagi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, deplisi akan mempercepat habisnya jumlah sumber daya alam ini akibat pengurangan sumber daya yang ada. Sedangkan bagi sumber daya alam yang bisa diperbaharui, deplisi akan berpengaruh terhadap proses pemulihan sumber daya tersebut. Masa pemulihan bergantung pada seberapa cepat pengurangan sumber daya alam tersebut, jika proses pemulihan lebih lambat maka dipastikan ketersediaan sumber daya alam ini akan terancam jumlahnya (Sutikno dan Maryunani, 2006).

Menurut ahli lingkungan, ada dua kelompok masyarakat yang menjadi penyebab terjadinya deplisi sumber daya alam. Kelompok pertama adalah kaum kapitalis yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan keuntungan usahanya sehingga cenderung menguras sumber daya alam dalam waktu secepat mungkin. Kelompok kedua adalah kaum miskin yang memiliki kualitas hidup subsisten di mana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari harus menguras sumber daya alam yang ada disekitarnya tanpa memperhatikan tingkat kelestarian jumlah sumber daya alam tersebut. Dalam kurun waktu tertentu deplisi sumber daya alam akan mengakibatkan kelangkaan jumlah yang tersedia (Sutikno dan Maryunani, 2006).

### Kelangkaan Sumber Daya Alam

Kelangkaan merupakan implikasi dari deplisi yang dilakukan manusia terhadap sumber daya alam. Kelangkaan erat kaitannya dengan cadangan atau stok sumber daya alam itu sendiri. Cadangan sumber daya alam merupakan sumber daya alam yang sudah diketahui (*identified*) baik dari segi jumlah maupun deposit yang sudah terukur dalam satuan tertentu dan dapat diketahui manfaatnya. Jika terdapat sumber daya alam yang belum diketahui manfaatnya, meskipun jumlahnya melimpah tidak bisa disebut sebagai cadangan (*reserve*). Cadangan sumber daya alam akan meningkat apabila terjadi penemuan baru (*discovery*), peningkatan cadangan yang telah

terbukti (*extension*) dan revisi (*revision*) sebagai akibat kebutuhan informasi mengenai kondisi pasar dan teknologi baru (Sutikno dan Maryunani, 2006).

Dari penyebabnya, kelangkaan sumber daya alam dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu (Sutikno dan Maryunani, 2006):

1. Kelangkaan yang terjadi akibat terbatasnya jumlah cadangan sumber daya alam yang tidak mampu mencukupi kebutuhan lokal atau wilayah tertentu.
2. Kelangkaan yang terjadi akibat letak sumber daya alam terkonsentrasi pada wilayah tertentu dan dibutuhkan ditempat lain.
3. Kelangkaan seperti ini terjadi karena ketidak-lancaran proses distribusi. Kelangkaan yang terjadi akibat pengurusan sumber daya alam secara terus-menerus sehingga mengakibatkan jumlah cadangan sumber daya alam semakin berkurang sepanjang waktu.

Dari ketiga faktor diatas, faktor yang paling berperan dalam meningkatkan kelangkaan adalah faktor ketiga yaitu akibat pengurusan sumber daya alam secara terus menerus. Selanjutnya kelangkaan dapat diklasifikasikan dalam dua bentuk, yaitu kelangkaan absolut (*absolut scarcity*) dan kelangkaan relatif (*relative scarcity*) (Suparmoko, 1994).

Kelangkaan absolut sering juga disebut "*malthusian scarcity*" karena konsep kelangkaan absolut pertama kali diperkenalkan oleh Robert Malthus. Kelangkaan absolut didefinisikan sebagai fenomena kelangkaan sumber daya alam secara fisik. Sistem ekonomi sering tergantung pada satu sumber daya esensial yang memiliki batas tertentu dalam ketersediaannya secara fisik. Jika sumber daya alam ini habis maka akan menentukan batas-batas fisik pada proses ekonomi baik produksi maupun konsumsi. Periode kelangkaan absolut ini mula terjadi ketika permintaan (*demand*) akan suatu sumber daya alam melebihi penawarannya (*supply*). Jika hal ini terjadi terus-menerus mengakibatkan pengurusan sumber daya alam dan pada akhirnya akan mengurangi cadangan sumber daya alam sampai habis.

Kelangkaan relatif sering disebut sebagai "*ricardian scarcity*". Kelangkaan sumber daya relatif terjadi ketika sumber daya masih cukup tersedia untuk memenuhi kebutuhan tetapi distribusinya tidak merata bagi yang membutuhkan sumber daya alam tersebut.

Tietenberg (1992) dalam Sutikno dan Maryunani (2006) berpendapat bahwa suatu indikator yang ideal untuk menilai kelangkaan sumber daya alam harus memiliki tiga ciri penting:

1. Mengacu kemasa depan  
Indikator ini mempertimbangkan pola permintaan masa depan, sumber-sumber alternatif bagi sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui, perubahan dalam biaya ekstraksi atau pengolahan dan lainnya.
2. Komparibilitas (*comparability*)  
Indikator yang ideal harus dimungkinkan adanya perbandingan langsung diantara sumber daya alternatif untuk mengidentifikasi permasalahan yang paling serius dihadapi sumber daya alam terutama yang berkenaan dengan kelangkaan. Perbandingan ini tidak hanya untuk menilai tingkat kelangkaan tetapi juga sejauh mana seriusnya kelangkaan tersebut dan hal ini harus dipertimbangkan dalam penilaian kelangkaan sumber daya alam.
3. Komputabilitas (*computability*)  
Indikator ini mempertimbangkan bahwa kelangkaan sumber daya harus diperhitungkan dan dianalisa berdasarkan informasi yang tersedia atau informasi yang bisa diperoleh secara terbuka.

## **Ikan Sebagai Sumber Daya**

Indonesia sebagai negara maritim dengan luas wilayah kelautan mencapai dua per tiga dari total wilayah negara memiliki potensi kelautan yang sangat besar. Potensi kelautan yang paling nyata adalah ikan. Ikan merupakan salah satu sumber daya dengan sifat bisa diperbaharui selama pemanfaatannya tidak melebihi ambang batas. Selain itu, dari sifat dapat diperbaharui ini ikan merupakan sumber daya alam milik umum (*common resources*).

Permasalahan yang timbul dari sifat sumber daya ikan yang *common resource* adalah bahwa ikan merupakan sumber daya milik umum. Artinya, masyarakat beranggapan bahwa sumber daya milik umum berarti bukan milik siapa-siapa, berarti pula milik setiap orang. Masyarakat cenderung lebih eksploitatif dan kurang bertanggung jawab dalam penggunaannya karena sifat sumber daya yang demikian. Anggapan seperti itu membawa sumber daya ikan pada kondisi deplisi yang berlebihan (Suparmoko, 1994).

Porter (2001) menyatakan bahwa permasalahan perikanan di negara berkembang adalah terlalu banyaknya armada penangkapan ikan dan sejumlah negara berkembang memiliki kelebihan kapasitas armada yang serius selama bertahun-tahun.

*“In the fisheries sector, however, the contrast between industrialized and developing countries in regard to fishing fleet overcapacity is often not clear-cut. Fishing fleet overcapacity is endemic among fishing nations, and number of developing countries have had serious overcapacity in their national fleets for many years...”*(Porter, 2001)

Sebagai sumber daya alam, ikan memiliki sifat dapat diperbarui artinya ikan memiliki kemampuan alamiah dalam memperbanyak jumlahnya (reproduksi). Kemampuan reproduksi ini bisa berlangsung jika eksploitasi terhadap ikan masih dibawah ambang batas dengan kata lain pemanfaatannya hanya sebagian dari total populasi ikan yang terkandung pada perairan tertentu sehingga jumlah ikan yang tersisa mampu berkembang biak untuk melestarikan populasinya sendiri. Dari sifat sumber daya ikan tersebut, eksploitasi ikan secara berlebih tanpa memperhatikan struktur umur dan rasio kelamin dari populasi ikan akan berdampak pada rendahnya tingkat kemampuan ikan untuk memulihkan diri (*renewable*) (Sutikno dan Maryunani, 2006).

Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya alam ikan haruslah bijak. Eksploitasi yang dilakukan tetap harus melihat ambang batas dari pemanfaatan tersebut. Selain itu dibutuhkan pengelolaan yang serius agar populasi ikan terus bisa dimanfaatkan keberadaannya. Upaya pengelolaan yang bisa dilakukan adalah dengan cara penangkapan secara selektif. Pendekatan ini secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu (Sutikno dan Maryunani, 2006):

#### 1. Penutupan musim penangkapan ikan

Pendekatan ini dilakukan berdasarkan pada sifat sumber daya ikan yang sangat bergantung pada faktor musim. Pada bulan-bulan tertentu jumlah ikan bisa sangat melimpah namun pada bulan-bulan tertentu pada perairan yang sama jumlah ikan justru menurun bahkan tidak ada sama sekali pada perairan yang sama. Musim ikan juga bergantung pada siklus hidup ikan yang lahir, besar dan mati pada waktu tertentu.

Menurut Beddington dan Rettig dalam Suparmoko (1994) paling tidak ada dua bentuk penutupan musim penangkapan ikan, yaitu:

- a) Menutup musim penangkapan ikan pada waktu tertentu untuk memungkinkan ikan dapat memijah dan berkembang.
- b) Penutupan kegiatan penangkapan ikan karena sumber daya ikan telah mengalami penurunan jumlah sehingga ikan yang ditangkap semakin sedikit.

Indikator yang bisa digunakan dalam pendekatan ini adalah dengan melihat *catch per-unit effort* (CPUE) yaitu perbandingan hasil tangkapan ikan pada bulan-bulan tertentu oleh nelayan. Jika pada bulan tertentu jumlah tangkapan ikan melimpah menandakan pada bulan tersebut adalah musim tangkap ikan, namun jika pada bulan lainnya tidak ada ikan yang ditangkap menunjukkan pada bulan itu bukan musim tangkap ikan. Selain itu indikator lain adalah dengan melihat studi-studi yang telah dilakukan untuk mengetahui siklus hidup ikan di suatu perairan.

#### 2. Penutupan daerah penangkapan ikan

Pendekatan ini berarti menutup segala kegiatan penangkapan ikan pada daerah tangkap ikan tertentu sesuai waktu yang telah ditentukan. Penutupan bisa bersifat sementara, bisa juga bersifat permanen. Penutupan permanen biasanya dilakukan berdasarkan pada alasan-alasan ekologi dan biologi (ekobiologi) daerah tersebut di mana usaha ini juga dikaitkan dengan upaya konsevasi jenis ikan tertentu yang terancam kepunahannya. Penutupan daerah penangkapan ikan pada dasarnya melarang penangkapan ikan di daerah dipijah (*spawning ground*) atau diasuh (*nursery ground*).

Selain itu, kebijakan penutupan daerah penangkapan ikan dapat juga bersifat selektif dengan cara mengkhususkan daerah tangkap ikan pada nelayan dengan skala tertentu. Contoh kebijakan ini dikenal dengan nama *coastal belt* atau *fishing belt*, yaitu kawasan dengan radius atau jarak tertentu dari garis pantai yang diperuntukkan bagi kelompok atau golongan nelayan tertentu yang sering digunakan di negara berkembang.

### **Pengukuran Ketersediaan Sumber Daya Alam**

Untuk jenis sumber daya dapat diperbarui (*flow*) ada beberapa konsep pengukuran ketersediaan yang sering digunakan. Pengukuran tersebut antara lain (Fauzi, 2004):

### 1. Potensi Maksimum Sumber Daya

Konsep ini didasarkan pada pemahaman untuk mengetahui potensi atau kapasitas sumber daya guna menghasilkan barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu. Pengukuran ini biasanya didasarkan pada perkiraan-perkiraan ilmiah atau teoritis, misalnya diperkirakan bahwa bumi mempunyai kapasitas untuk memproduksi sekitar 40 ton pangan per orang per tahun. Pengukuran potensial maksimum lebih didasarkan pada kemampuan biofisik alam tanpa mempertimbangkan kendala sosial yang ada.

### 2. Kapasitas Lestari (*Sustainable Capacity / Sustainable Yield*)

Kapasitas lestari atau produksi lestari adalah konsep pengukuran keberlanjutan di mana ketersediaan sumber daya diukur berdasarkan kemampuannya untuk menyediakan kebutuhan bagi generasi kini dan juga generasi mendatang. Berkaitan dengan sumber daya ikan misalnya, konsep ini sering dikenal sebagai *sustainable yield* di mana secara teoritis alokasi produksi dapat dilakukan sepanjang waktu jika tingkat eksploitasi dikendalikan. Untuk menghitung tingkat lestari pasokan ikan di laut perlu dilihat hasil tangkapan per satuan upaya (*catch per unit effort*) atau lebih dikenal dengan CPUE. MSY *Schaefer* adalah model penghitungan *sustainable yield* yang sering digunakan oleh para peneliti untuk menggambarkan kondisi perikanan di suatu perairan.

### 3. Kapasitas Penyerapan (*Absorptive Capacity*)

Kapasitas penyerapan atau kapasitas asimilasi adalah kemampuan sumber daya alam dapat pulih (misalnya air dan udara) untuk menyerap limbah akibat aktivitas manusia. Kapasitas ini bervariasi akibat faktor eksternal seperti cuaca dan intervensi manusia.

Penurunan hasil tangkapan ikan di Kecamatan Muncar secara ekonomi akan berdampak pada pendapatan rumah tangga perikanan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pendapatan merupakan motor dalam mencapai kesejahteraan bagi masyarakat sehingga penurunan hasil tangkapan yang terjadi pada tahun 2010-2011 akan berpengaruh terhadap jumlah pendapatan yang selanjutnya berdampak pada usaha pemenuhan kebutuhan rumah tangga masyarakat pesisir sebelum dan sesudah terjadi penurunan hasil tangkapan ikan.

Setelah terjadi penurunan hasil tangkapan maka dampak sosial yang dihadapi masyarakat pesisir adalah bagaimana upaya masyarakat pesisir dalam melakukan alternatif kegiatan produktif di luar sektor perikanan dengan catatan bahwa penurunan hasil tangkapan berbanding lurus dengan tingkat pendapatan yang diterima masyarakat pesisir.

## C. METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dimana untuk mengetahui pengaruh penurunan hasil tangkapan ikan terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir khususnya nelayan pandega, peneliti harus berinteraksi langsung dengan masyarakat yang bersangkutan guna mendapatkan informasi yang tepat mengenai implikasi penurunan jumlah tangkapan ikan terhadap kondisi ekonomi dan sosial masyarakat pesisir di Kecamatan Muncar yang selanjutnya oleh peneliti digambarkan secara deskriptif.

Menurut Nazir (1988) penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa masa sekarang. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena-fenomena tertentu sehingga merupakan suatu studi komparatif. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 1988).

Sugiyono dalam Gunawan (2010) mengemukakan bahwa metode kualitatif ialah metode penelitian yang berlandaskan pada falsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Selanjutnya, menurut Moleong (2006) penelitian kualitatif tidak pernah terlepas dari istilah analisis fonomenologi. Peneliti dalam pandangan fenomenologis berusaha memahami peristiwa dan kaitannya terhadap orang-orang yang berada dala situasi tertentu. Pada penelitian ini, peneliti



mendasari penelitian dengan adanya fenomena penurunan jumlah hasil tangkapan ikan di Kecamatan Muncar. Kecamatan Muncar dipilih menjadi lokasi penelitian karena sampai saat ini Muncar masih menjadi pelabuhan utama penangkapan ikan di Kabupaten Banyuwangi dan Jawa Timur. Penurunan jumlah hasil tangkapan ikan akan mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir Muncar, meliputi mereka yang bekerja sebagai nelayan, rumah tangga pengolah ikan, rumah tangga pedagang ikan, bahkan industri-industri besar yang sudah ada.

### **Unit Analisis dan Penentuan Informan**

Penelitian deskriptif menghendaki adanya batasan dalam penelitian atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal; *pertama*, batas menentukan kenyataan jamak yang kemudian mempertajam fokus; *kedua*, penetapan fokus dapat lebih dekat dihubungkan oleh interaksi antara peneliti dan fokus. Dengan kata lain, bagaimanapun penetapan fokus sebagai pokok masalah penelitian adalah suatu keharusan karena penelitian kualitatif tidak dimulai dari suatu yang kosong melainkan dilakukan berdasarkan suatu fenomena yang terjadi dalam masyarakat yang menimbulkan perspektif di kalangan masyarakat pada umumnya yang selanjutnya disebut sebagai unit analisis penelitian.

Penentuan unit analisis dalam penelitian ini adalah masyarakat pesisir yang terdiri dari nelayan pandega, pedagang ikan eceran, dan rumah tangga pengolahan ikan (pemindangan). Berdasarkan fenomena yang terjadi di Kecamatan Muncar pada tahun-tahun ini, yaitu penurunan jumlah hasil tangkapan nelayan maka peneliti menganggap bahwa telah terjadi suatu hubungan sebab akibat yang saling berkaitan dengan kondisi tersebut. Sebab akibat di sini yang selanjutnya menjadi salah satu rumusan masalah dalam penelitian yang oleh peneliti ingin diungkap melalui beberapa sudut pandang dan dari beberapa latar belakang narasumber. Artinya, peneliti berharap memperoleh data langsung dari berbagai perspektif narasumber, di antaranya dari kacamata pemerintah melalui dinas-dinas terkait, dari penelitian ilmiah yang pernah dilakukan sebelumnya, dan dari kacamata masyarakat pesisir yang tentu merasakan fenomena penurunan jumlah tangkapan nelayan akhir-akhir ini.

Terkait masalah penentuan informan, informan atau narasumber ditentukan berdasarkan rekomendasi oleh petugas Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar sesuai dengan latar belakang penelitian, yaitu informan yang mampu menjelaskan suatu fenomena karena dianggap sebagai subjek yang mengetahui dan merasakan suatu fenomena yang terjadi disekitarnya. Bungin dalam Gunawan (2010) menyatakan bahwa penelitian kualitatif bertolak pada asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik atau kompleks, oleh karena itu prosedur penentuan sampel yang paling penting adalah bagaimana menentukan informan kunci atau situasi sosial tertentu yang sesuai dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, informan difokuskan kepada masyarakat pesisir yang memiliki pekerjaan dari golongan bawah dikarenakan para informan ini adalah pihak-pihak yang paling merasakan dampak dari penurunan kegiatan perikanan di Muncar. Guna mendapatkankeselaras informasi penelitian ini menggunakan metode triangulasi data primer dari pernyataan beberapa informan terkait.

Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Nelayan Pandega**

Nelayan pandega atau biasa disebut anak buah kapal (ABK) adalah nelayan yang tidak memiliki aset kapal dan modal, tetapi memiliki tenaga untuk dijual kepada nelayan juragan dalam membantu usaha penangkapan ikan di laut. Nelayan pandega diikat oleh kontrak kerja tradisional yang masih menggunakan sistem utang-piutang kepada seorang juragan sebagai pengikat kerja. Tidak-adanya modal finansial yang dimiliki oleh nelayan pandega mengindikasikan bahwa nelayan pandega merupakan pekerja kasar yang menjadi ciri golongan masyarakat menengah kebawah sehingga peneliti memilih nelayan pandega sebagai informan kunci dalam penelitian ini.

#### **2. Pengolah skala Rumah Tangga**

Pengolah ikan skala rumah tangga adalah pihak-pihak yang mengolah ikan menjadi komoditas setengah jadi, seperti pengawetan melalui pengasapan, pengasinan, pemindangan, dan lain sebagainya namun dalam skala *home industry*. Dalam penelitian ini, informan rumah tangga adalah pemindang karena sebagai pemindang bahan baku yang digunakan adalah jenis ikan *pelagis* yaitu tongkol. Penurunan hasil tangkapan ikan yang terjadi di Muncar pada tahun 2010-2011 lebih didominasi oleh jenis ikan *pelagis* termasuk didalamnya ikan

tongkol itu sendiri sehingga akan berdampak pada kondisi perekonomian masyarakat dengan latar belakang pemindang yang memanfaatkan ikan tongkol sebagai bahan baku produksi.

### 3. Pedagang Ikan

Pedagang ikan adalah pihak-pihak yang memperjual-belikan barang berupa ikan kepada konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penelitian ini, informan yang ditentukan adalah pedagang ikan eceran (kecil) karena menurut peneliti pedagang ikan kecil merupakan golongan masyarakat bawah yang mengandalkan hasil tangkapan nelayan untuk menyokong kebutuhan rumah tangganya yang masih tergolong subsisten.

## Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui:

### 1. Wawancara

Sumber data diperoleh dari hasil wawancara mendalam terhadap perorangan yaitu secara langsung antara pewawancara dengan responden penelitian. Menurut Sugiyono dalam Gunawan (2010), ada 3 (tiga) macam wawancara yakni wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur, dan wawancara tidak terstruktur. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara semiterstruktur agar lebih bebas dalam menggali informasi terhadap responden tanpa menghilangkan poin-poin penelitian dasar yang ingin diketahui.

Melalui metode ini peneliti berharap dapat mengetahui lebih mendalam tentang kondisi perikanan tangkap Muncar yang berdampak terhadap kondisi ekonomi dan sosial masyarakat pesisir terutama mereka yang memiliki mata pencaharian sebagai berikut:

#### (1) Nelayan

Nelayan yang akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah nelayan pandega atau biasa disebut sebagai Anak Buah Kapal (ABK).

#### (2) Pedagang Ikan

Pedagang ikan yang akan menjadi responden dalam penelitian ini adalah pedagang ikan eceran.

#### (3) Pengolah (pemindangan) skala rumah tangga

Rumah tangga pengolah adalah pihak lain yang pendapatannya dipengaruhi oleh hasil tangkapan ikan. Wawancara ditujukan pada rumah tangga pengolah ikan (pemindangan) karena mayoritas merupakan golongan masyarakat kelas menengah kebawah dengan pemenuhan kebutuhan yang cenderung subsisten.

### 2. Pengambilan data sekunder

Guna mendukung kegiatan penelitian dan sebagai bahan dalam uji statistik, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang telah tercatat oleh dinas-dinas terkait seperti dari:

#### 1) Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar:

- Data jumlah produksi per jenis ikan tahun 2009 – 2012
- Data jumlah produksi ikan lemuru tahun 2009 – 2012

#### 2) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi:

- Keadaan geografis dan topografi daerah
- Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan sebagai nelayan setiap kecamatan
- Keadaan umum perikanan Kabupaten Banyuwangi
- Perkembangan produksi perikanan dan kelautan serta pengaruhnya
- Upaya Dinas Kelautan dalam melindungi sumber daya hayati

## Teknik Analisis Data

Istijanto dalam Gunawan (2010) mengatakan bahwa teknik analisis data kualitatif merupakan kajian yang menggunakan data-data, teks, persepsi, dan bahan-bahan tertulis lain untuk mengetahui hal-hal yang tidak terukur dengan pasti (*intangible*). Analisis data secara kualitatif bersifat hasil temuan secara mendalam melalui pendekatan bukan angka atau nonstatistik.

Analisis data dilakukan secara deskriptif dari hasil wawancara terhadap responden yang telah ditentukan dan penyajian tabel jika diperlukan dari semua data sekunder yang terkait dengan tujuan penelitian setelah diidentifikasi terhadap hal-hal berikut ini.

### 1) Hasil wawancara

Tujuan dilakukan kegiatan wawancara pada dasarnya untuk mengetahui pengaruh turunnya hasil tangkapan ikan terhadap pendapatan masyarakat yang telah digolongkan pada

variabel penelitian yaitu masyarakat pesisir. Wawancara juga dilakukan terhadap dinas-dinas terkait, yaitu pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi dan juga pegawai Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar. Dalam kegiatan wawancara, responden adalah subjek penelitian yang akan digali segala jenis informasi yang berkaitan dengan penurunan hasil tangkapan ikan di Muncar mulai dari penyebab, pengaruh, dan usaha yang dilakukan masyarakat pesisir dalam menyikapinya.

Untuk memastikan konsistensi keterangan responden maka teknik wawancara dilakukan dengan metode triangulasi guna membandingkan pernyataan responden satu dengan yang lain.

## 2) Penyajian data sekunder

Dari data sekunder yang telah dikumpulkan akan dapat terlihat tren perkembangan beberapa variabel, diantaranya jumlah hasil tangkapan ikan pada tahun-tahun sebelumnya, total nilai produksi perikanan dari tahun 2009-2012, perkembangan jumlah nelayan dan armada perikanan. Selain itu, data sekunder digunakan untuk melakukan uji statistik terhadap pemanfaatan sumber daya perikanan tangkap yang dilakukan oleh masyarakat pesisir khususnya mereka yang memiliki latar belakang sebagai nelayan.

## **Keabsahan Temuan**

Agar diperoleh temuan yang reliabel, maka peneliti melakukan pengecekan terhadap data yang dikumpulkan yaitu dengan cara observasi yang mendalam dan triangulasi informasi.

Rahardjo dalam Dwi Hartanto (2010) mengatakan bahwa triangulasi pada hakekatnya merupakan pendekatan multimetode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Memotret fenomena tunggal dari sudut pandang yang berbeda-beda akan memungkinkan diperoleh tingkat kebenaran yang handal. Karena itu, triangulasi adalah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan data dan analisis data.

## **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

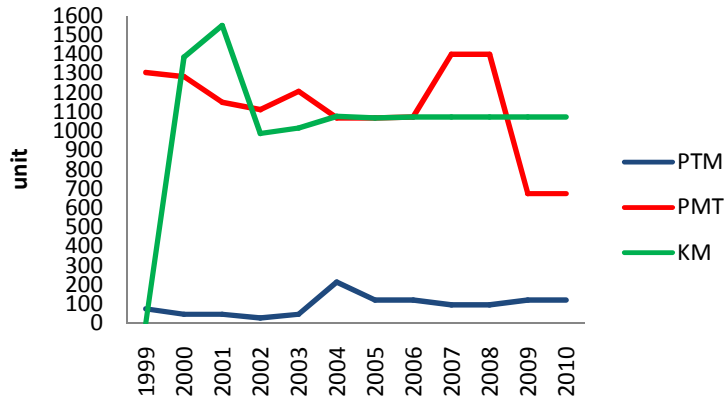
### **Keadaan Umum Perikanan Tangkap Muncar**

Muncar adalah kecamatan penghasil ikan utama di Kabupaten Banyuwangi yang memiliki daerah tangkapan di Paparan Jawa Selat Bali dengan luas 960 mil<sup>2</sup> atau sepanjang garis pantai timur Banyuwangi. setidaknya ada 36 jenis ikan yang didaratkan di pelabuhan perikanan Muncar namun hanya lemuru yang mendominasi hasil tangkapan nelayan yaitu ±80% dari total jumlah ikan yang didaratkan. Menurut masyarakat nelayan pandega, musim tangkapan ikan biasanya terjadi pada pertengahan tahun atau pada bulan Agustus-Desember atau paling tidak sebelum musim baratan (baca: penghujan) karena pada musim penghujan ikan cenderung tidak ada.

### **Perkembangan Armada Perikanan Muncar**

Sebagai penghasil ikan utama di Kabupaten Banyuwangi, banyaknya produksi perikanan tangkap di Muncar tidak terlepas dari perkembangan jumlah armada dari tahun ke tahun. Dari tahun 1999 sampai dengan 2010 perkembangan armada perikanan di Muncar dapat dilihat pada gambarl berikut ini.

Gambar 1: Perkembangan armada perikanan Muncar



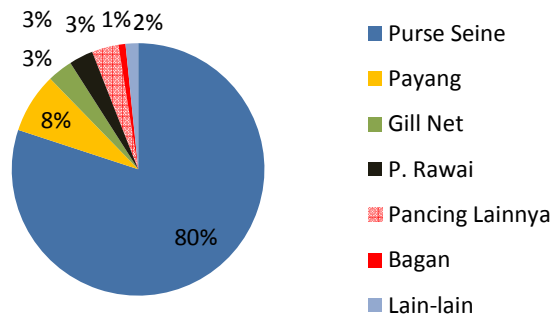
Sumber: PPP Muncar (diolah)

Pada gambar 1 terlihat bahwa perkembangan armada perikanan Muncar untuk kapal motor dan perahu motor tempel hampir memiliki jumlah yang sama. Perahu motor tempel memang diminati oleh nelayan kecil yang ada di Muncar karena mampu menjangkau daerah tangkapan yang lebih jauh dibanding dengan perahu tanpa motor harga untuk perahu motor tempel ini pun juga lebih murah jika dibanding dengan kapal motor. Dengan adanya motorisasi dari pemerintah pada tahun 2000 nelayan mulai menggunakan kapal motor. Sejak adanya penggunaan kapal motor, jumlah nelayan yang menggunakan perahu tanpa motor dan perahu motor tempel berkurang.

### Perkembangan Alat Tangkap

Hasil perikanan tangkap di Muncar dihasilkan dari beberapa jenis alat tangkap namun untuk jenis ikan lemuru alat tangkap yang digunakan adalah pukat cincin (*purse seine*) dan jenis alat tangkap payang. Pukat cincin adalah alat tangkap yang memiliki produktivitas tinggi dalam usaha penangkapan. Dari total seluruh hasil tangkapan ikan berdasarkan alat tangkap 80% hasil tangkapan di Kabupaten Banyuwangi dihasilkan oleh alat tangkap jenis pukat cincin seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2: Produktivitas alat tangkap di Banyuwangi 2010

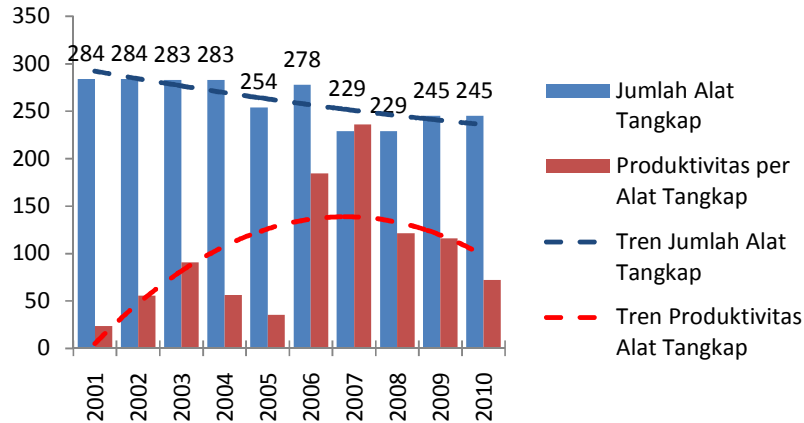


Sumber: PPP Muncar (diolah)

*Purse seine* adalah alat tangkap yang memiliki produktivitas yang paling tinggi jika dibandingkan dengan alat tangkap lainnya. Muncar sendiri merupakan penghasil ikan lemuru di Kabupaten Banyuwangi dimana alat tangkap yang digunakan nelayan adalah jenis alat tangkap *purse seine* dan payang sehingga dari gambar 4.4 bisa diketahui bahwa produksi perikanan di Kabupaten Banyuwangi dan Muncar didominasi oleh ikan *pelagis* lemuru. Terkait masalah produktivitas alat tangkap *purse seine* dan payang, di Kecamatan Muncar antara tahun 2001-2010 mengalami fluktuasi produktivitas kedua alat tangkap ini. Pada gambar 4.5 terlihat bahwa produktivitas kedua alat tangkap ini berada pada kondisi puncak di tahun 2007 dengan jumlah alat

tangkap sebanyak 229 unit dengan rata-rata hasil ikan yang mampu ditangkap per unit alat sebesar 236,20 ton dalam setahun.

Gambar 3: Tren produktivitas *purse seine* dan payang di Muncar tahun 2001-2010



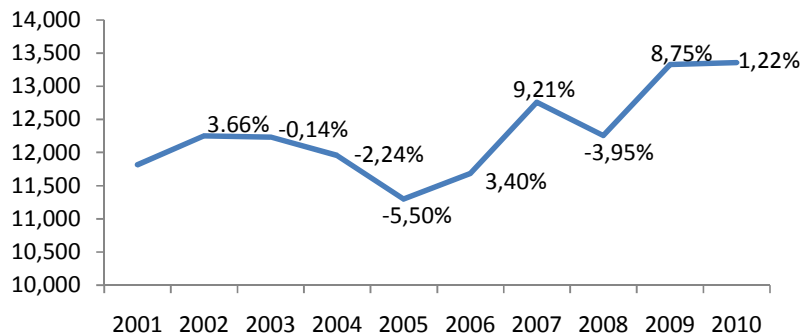
Sumber: PPP Muncar (diolah)

Produktivitas berkaitan erat dengan jumlah alat tangkap yang digunakan oleh nelayan dan berbanding positif dengan jumlah nelayan itu sendiri. Artinya, semakin banyak nelayan yang berada pada suatu wilayah perairan maka jumlah alat tangkap yang digunakan juga semakin banyak. Oleh karena itu perkembangan jumlah nelayan juga turut andil dalam mencapai nilai produktivitas suatu alat tangkap khususnya di Muncar.

#### Pertumbuhan Jumlah Nelayan

Pertumbuhan jumlah nelayan di Muncar rata-rata 1,6% per tahun. Pada gambar 4.6 berikut ini terlihat bahwa jumlah nelayan yang ada di Muncar diwarnai dengan keadaan yang fluktuatif. Penurunan tajam terjadi pada tahun 2005 yaitu sebesar -5,5%. Selanjutnya pada tahun 2007 jumlah nelayan meningkat sebesar 9,2% dan pada tahun 2009 mengalami peningkatana lagi sebesar 8,75% meski pada tahun 2008 sempat mengalami penurunan sebesar -3,95%.

Gambar 4: Perkembangan jumlah nelayan di Muncar



Sumber: PPP Muncar (diolah)

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pada tahun 2007 merupakan puncak produktivitas alat tangkap yang digunakan di Muncar. Pada tahun 2007 ini jumlah nelayan meningkat sebanyak 9,21% jika dibanding dengan tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan gambar produktivitas alat tangkap yang sebelumnya telah dijelaskan, jumlah alat tangkap mengalami penurunan namun nelayan justru mengalami peningkatan pada tahun 2007. Hal ini

disebabkan karena jumlah alat tangkap yang digunakan nelayan bergeser ke alat tangkap jenis *purse seine* sedangkan untuk jenis alat tangkap payang mengalami penurunan. Hal ini mengindikasikan bahwa pada tahun 2007 pasokan ikan lemuru di Selat Bali memang melimpah sehingga nelayan berspekulasi untuk mengganti alat tangkap dari payang menjadi *purse seine* yang memiliki kapasitas tangkapan jauh lebih besar.

### Keadaan Perikanan Muncar tahun 2009-2012

Muncar merupakan penghasil ikan tangkap utama di Kabupaten Banyuwangi dengan lemuru sebagai jenis ikan utama hasil tangkapan nelayan. Pemanfaatannya juga sudah intensif terbukti dari banyaknya jumlah nelayan dan armada penangkapan yang melimpah serta tumbuhnya industri-industri perikanan di kawasan ini. Pada tahun 2009 jumlah ikan lemuru yang berhasil didaratkan sebesar 28.446 ton dengan nilai produksi sebesar Rp 56,8 M. namun pada tahun 2010 jumlah ikan lemuru yang berhasil didaratkan nelayan menurun drastis dan hanya mampu mendaratkan sebesar 17.717 ton saja dengan nilai produksi sebesar Rp 57 M lebih besar jika dibanding dengan tahun 2009. Penurunan tajam ini terus terjadi hingga tahun 2011 dengan jumlah ikan yang berhasil didaratkan di Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar sebesar 1.651 ton saja. Turunnya jumlah tangkapan ini tidak terlepas dari turunnya jumlah pasokan ikan yang ada di Selat Bali sehingga nelayan cenderung mencari daerah tangkapan lain seperti di perairan Pancer.

Penurunan jumlah hasil tangkapan yang terjadi di Muncar tidak terlepas dari bagaimana pemanfaatan sumber daya ikan ini pada tahun-tahun sebelumnya. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purwningsih et.al bahwa pemanfaatan yang dilakukan oleh nelayan Muncar di Selat Bali sudah dalam kondisi *over fishing* atau penangkapan berlebih. Penangkapan berlebih terjadi jika dalam usaha penangkapan, hasil tangkapan yang dilakukan oleh nelayan melebihi kapasitas lestari pasokan ikan di laut.


### Profil Informan

Nelayan pandega merupakan golongan masyarakat dengan tingkat kebutuhan subsisten di mana kebutuhan sehari-hari harus dapat dipenuhi dari penghasilan hari itu juga atau dengan kata lain mereka adalah kelompok masyarakat golongan bawah dalam struktur sosial. Selain itu dalam sistem pengupahan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa nelayan pandega adalah pihak terakhir dalam sistem pengupahan pada kapal *purse seine* sehingga proporsi upah yang mereka dapatkan adalah yang paling sedikit mengingat jumlah nelayan pandega dalam satu kapal rata-rata berjumlah diatas 30 orang.





Rendahnya proporsi upah yang diterima nelayan pandega menyebabkan kelompok masyarakat ini yang paling merasakan dampak dari penurunan hasil tangkapan ikan lemuru di Muncar sehingga peneliti tertarik untuk menggali informasi dari golongan masyarakat ini terkait dengan dampak yang dirasakan nelayan pandega ketika terjadi penurunan di sektor perikanan tahun 2010-2011 di Muncar. Selain itu, peminang juga dianggap penting dalam menggali informasi karena peminang merupakan refleksi dari industri rumah tangga yang bergantung pada kondisi jumlah tangkapan nelayan.

Pada dasarnya nelayan pandega dan peminang adalah informan kunci yang menyediakan data primer dari penelitian ini namun sebagai pembanding informasi peneliti melibatkan masyarakat dengan latar-belakang yang berbeda yaitu nelayan kecil dan pedagang ikan kecil agar dapat diketahui perbedaan implikasi penurunan hasil tangkapan ikan lemuru di Kecamatan Muncar, maka sesuai dengan rekomendasi dari pihak Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar, informan yang diambil dari kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut.


Tabel 1: **Daftar informan**

Profil Informan	
	Nama : Masrawi
	Pekerjaan : Nelayan
	Alamat : Ds. Kedungrejo
	Profil : Masrawi adalah nelayan pemilik perahu motor tempel yang tinggal disekitar pelabuhan. Beliau bekerja sebagai nelayan sudah lebih dari 20 tahun.

Lanjutan: **Daftar Informan**

	<p>Nama : Tamin  Pekerjaan : Nelayan  Alamat : Ds. Kedungrejo  Profil : Sama seperti Masrawi, Tamin adalah nelayan pemilik motor tempel yang tinggal disekitar pelabuhan. Beliau bekerja sebagai nelayan sudah lebih dari 30 tahun. Istrinya memiliki warung disekitar pelabuhan namun juga melakukan pengasinan.</p>
	<p>Nama : Sugeng  Pekerjaan : Nelayan Pandega (<i>Purse Seine</i>)  Alamat : Ds. Kedungrejo  Profil :  Sugeng bekerja menjadi nelayan pandega kapal <i>purse seine</i> sejak tahun 2002. Sebagai kepala rumah tangga, Sugeng memiliki dua orang anak yang masih sekolah di tingkat Sekolah Dasar. Istrinya adalah ibu rumah tangga yang tidak memiliki kegiatan produktif.</p>
	<p>Nama : Baihaki  Pekerjaan : Nelayan Pandega (<i>Purse Seine</i>)  Alamat : Ds. Kedungrejo  Profil :  Baihaki bekerja menjadi nelayan pandega kapal <i>purse seine</i> sejak tahun 2004. Sama seperti Sugeng, Baihaki juga merupakan kepala rumah tangga yang saat ini sedang membiayai pendidikan seorang anak yang masih berada ditingkat Sekolah Dasar. Istrinya adalah ibu rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan produktif lainnya.</p>
	<p>Nama : Budi  Pekerjaan : Nelayan Pandega (<i>Purse Seine</i>)  Alamat : Ds. Kedungrejo  Profil :  Budi bekerja sebagai nelayan pandega sejak tahun 2006 di mana setelah menyelesaikan pendidikan SMA beliau langsung bergabung menjadi kru laut salah satu juragan darat. Budi belum memiliki istri dan masih tinggal bersama orang tuanya yang bekerja sebagai buruh pabrik es.</p>
	<p>Nama : Sobirin  Pekerjaan : Nelayan Pandega (<i>Purse Seine</i>)  Alamat : Ds Kedungrejo  Profil :  Sobirin bekerja sebagai nelayan pandega sejak tahun 1999. Sobirin memiliki 3 orang anak dan masih membiayai pendidikan 2 anaknya terakhir yang masih duduk di SMP dan SMA sedangkan anak pertamanya hanya lulus SMP dan bekerja sebagai buruh angkut. Istrinya tidak memiliki kegiatan produktif lainnya.</p>

Lanjutan: **Daftar Informan**

	<p>Nama : Rozi  Pekerjaan : Nelayan Pandega (<i>Purse Seine</i>)  Alamat : Ds. Kedungrejo  Profil :  Rozi bekerja sebagai nelayan pandega sejak tahun 2002. Sebagai kepala rumah tangga Rozi belum mempunyai anak untuk dibiayai pendidikannya. Istrinya memiliki warung gorengan yang ada disekitar Masjid Jami' Ds. Kedungrejo.</p>
	<p>Nama : Suroto  Pekerjaan : Pemindang  Alamat : Ds. Kedungrejo  Profil :  Suroto adalah pemindang yang meneruskan usaha pemindangan keluarganya. Suroto menangani kegiatan ini sendiri sejak tahun 2001 dengan dibantu 23 karyawan. Sebagai pemindang, Suroto tergolong kelompok masyarakat kelas menengah keatas.</p>
	<p>Nama : H. Imam Syafi'i  Pekerjaan : Pemindang  Alamat : Ds. Kedungrejo  Profil :  H. Imam Syafi'i merupakan salah satu juragan pemindang di Ds Kedungrejo. Beliau menjalankan usahanya sejak tahun 1996 dari usaha keluarganya dulu. Karyawan yang dipekerjakannya berjumlah 20 orang dengan spesialisasi pekerjaan yang beragam.</p>
	<p>Nama : Syiah  Pekerjaan : Pedagang ikan kecil  Alamat : Ds. Kedungrejo</p>
	<p>Nama : Sukati  Pekerjaan : Pedagang ikan kecil  Alamat : Ds. Kedungrejo</p>
	<p>Nama : Nurhaini  Pekerjaan : Pedagang ikan kecil  Alamat :</p>
	<p>Nama : Sintia  Pekerjaan : Pedagang ikan kecil  Alamat : Ds. Kedungrejo</p>

Sumber: Dokumentasi lapang, 2012

Pada dasarnya nelayan pendega adalah informan kunci yang menyediakan data primer dari penelitian ini namun sebagai pembanding informasi peneliti melibatkan masyarakat dengan latar-



belakang yang berbeda yaitu pemindang, nelayan kecil dan pedagang ikan agar dapat diketahui perbedaan implikasi penurunan hasil tangkapan ikan lemuru di Kecamatan Muncar.

### **Pandangan Masyarakat Pesisir Mengenai Sumber Daya Hayati Ikan**

Sebagai masyarakat yang masih tergolong tradisional, pemahaman akan pemanfaatan sumber daya masih cukup beragam, mungkin bagi sebagian masyarakat sudah mulai memahami namun sebagian juga tidak seperti yang akan dijelaskan berikut ini.

#### **1) Ketersediaan dan Deplisi Sumber Daya Ikan**

Masyarakat, khususnya nelayan, tidak mendasarkan pengetahuan dalam usaha menangkap ikan secara terkaji namun hanya berdasarkan pengalaman yang selama ini telah dialami. Mereka tetap berpegang teguh pada keyakinan yang mereka anut selama ini. Menurunnya hasil tangkapan ikan khususnya lemuru bukan karena semakin berkurangnya ketersediaan ikan di laut namun lebih kepada kondisi cuaca yang terjadi diwilayah perairan, setidaknya itu adalah pernyataan rasional masyarakat pesisir khususnya nelayan. Ikan cenderung melimpah pada saat cuaca tenang, tidak hujan dan tidak berangin mengingat ikan khususnya ikan *pelagis* yang memiliki karakteristik bergerombol, maka hanya beberapa daerah tangkapan yang memiliki hasil tangkapan melimpah.

Menurut Pak Baihaqi, penurunan hasil tangkapan ikan di perairan Selat Bali pada tahun 2010-2011 lebih dikarenakan oleh cuaca dan penggunaan lampu tembak yang dipasang pada kapal. Cuaca yang tidak kondusif menyebabkan ikan lemuru di perairan Selat Bali menurun tajam. Saat ini nelayan tidak bisa memprediksi dengan pasti kapan harus melaut, namun dari dulu sampai sekarang nelayan selalu melaut sebelum musim hujan. Cuaca yang tidak kondusif tersebut membuat kawan-an ikan lemuru berpindah ke perairan yang lebih tenang, yaitu didaerah perairan Pancer dan sekitarnya.

#### **2) Kapasitas Lestari**

Penelitian yang dilakukan oleh para akademisi sampai saat ini memang belum bisa merubah cara pandang masyarakat pesisir Muncar dalam memanfaatkan sumber daya ikan yang ada di Selat Bali. Masyarakat khususnya nelayan selalu memandang pragmatis dalam usaha memanfaatkan sumber daya ikan tersebut. Mereka tetap berpegang teguh pada kepercayaan dan pengalaman yang sudah dialaminya selama bertahun-tahun tanpa memandang seberapa besar kapasitas lestari yang terkandung dalam perairan itu sendiri. Penurunan jumlah ikan yang ada di Selat Bali pada tahun 2010-2011 bukan karena jumlah tangkapan yang didaratkan nelayan atau banyaknya nelayan yang melaut namun lebih kepada faktor cuaca dan kepercayaan yang mereka anut selama ini.

Pak Baihaqi dan Pak Sugeng selaku ABK juga tidak menyangkal adanya faktor kepercayaan yang dianut masyarakat pesisir Muncar dalam usaha mencari ikan. Petik laut yang selalu diadakan masyarakat Muncar sebagai buktinya. Menurut beliau, petik laut adalah bukti syukur nelayan atas apa yang telah diperoleh selama setahun ini dan sebagai harapan kelancaran rejeki di tahun berikutnya tentu saja dengan harapan ikan yang ada di laut melimpah. Jadi tidak mengherankan jika Pak Budi bersama rekan sesama ABK mengatakan bahwa penurunan ikan lemuru pada tahun 2010-2011 yang terjadi di Selat Bali dikarenakan sesaji yang dilarung ke laut kurang. Namun baik Pak Baihaqi, Pak Sugeng dan Pak Budi juga tidak memungkiri bahwa ada kondisi rasional yang turut menyebabkan penurunan jumlah ikan yaitu pemasangan lampu tembak pada kapal dan limbah yang berasal dari pabrik dan tambak ikan yang ada di Muncar.

### **Dampak dan Upaya Masyarakat Pesisir terhadap Penurunan Jumlah Tangkapan Ikan Lemuru tahun 2010-2011**

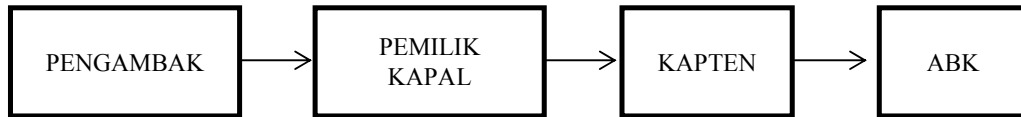
Penurunan hasil tangkapan ikan lemuru tahun 2010-2011 di Muncar tentu akan membawa dampak kepada masyarakat yang mengandalkan sektor perikanan lemuru maupun jenis ikan *pelagis* lainnya baik dampak secara ekonomi maupun sosial kepada masyarakat itu sendiri.

#### **1) Dampak Ekonomi**

Penurunan jumlah hasil tangkapan ikan lemuru pada tahun 2010-2011 yang signifikan secara langsung akan membawa dampak ekonomi pada masyarakat sekitarnya, terutama dampak negatif. Dampak negatif sangat dirasakan oleh masyarakat yang berlatar belakang nelayan pandega (Anak Buah Kapal) kapal *Purse Seine*. Hal ini disebabkan karena nelayan pandega adalah pihak paling akhir dalam proporsi pembagian hasil tangkapan ikan. Pada masyarakat nelayan Muncar, pembagian hasil tangkapan didasarkan pada beberapa urutan yang harus dilewati agar sampai

ditangan ABK yaitu Pengambak, Pemilik Kapal (Juragan Darat), Kapten Kapal (Juragan Laut), dan ABK.

Gambar 5: Alur Pembagian Hasil Tangkapan Nelayan Muncar



Sumber: Hasil wawancara, 2012

Mengingat pendapatan ABK dihitung berdasarkan proporsi hasil tangkapan, penurunan jumlah hasil tangkapan yang terjadi pada tahun 2010-2011 secara langsung akan menurunkan pendapatan ABK itu sendiri. Badan Pusat Statistik (BPS) menempatkan tingkat pendapatan pada urutan pertama sebagai indikator kesejahteraan ekonomi yang menunjukkan bahwa variabel ini merupakan motor dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari hasil wawancara dengan ABK, penurunan pendapatan yang terjadi selama jumlah hasil tangkapan ikan menurun memberikan dampak pada sulitnya pemenuhan kebutuhan keluarga.

Ketergantungan ABK terhadap juragannya memang sudah menjadi kebiasaan masyarakat Muncar, di mana juragan selain sebagai pemberi kerja juga merupakan solusi utama dalam mendapatkan pinjaman. Hal ini terbukti dari hasil wawancara dengan para ABK lainnya yang selaras dengan pernyataan Pak Sugeng diatas. Pengaruh juragan sangatlah tinggi kepada para ABK hal ini disebabkan karena terbatasnya lingkungan kerja (komunitas) ABK itu sendiri. Masing-masing ABK bekerja pada satu juragan sehingga memiliki hubungan searah antara pihak yang memiliki modal dan pihak yang memiliki kebutuhan subsisten, karena ada sangsi sosial yang diterapkan juragan kepada ABK-nya jika ABK memiliki hubungan dengan pemilik modal lainnya tanpa seijin juragan ABK itu sendiri.

Keterbatasan hubungan sosial ABK dengan juragan juga bisa terlihat dari lingkungan tempat tinggal ABK itu sendiri. ABK cenderung memiliki tempat tinggal dalam komunitas yang setara dengan mereka, yaitu mereka yang memiliki tingkat kebutuhan subsisten. Lain halnya dengan juragan yang cenderung menyebar namun memiliki hubungan satu dengan yang lainnya sehingga informasi antar juragan tetap ada. Selain itu, popularitas juragan dimata masyarakat pesisir juga menjadi media tersendiri dalam melancarkan informasi yang berkembang. Keadaan ini menjadikan juragan selalu memegang informasi yang berkembang, termasuk informasi yang berkaitan dengan pekerja-pekerjanya.

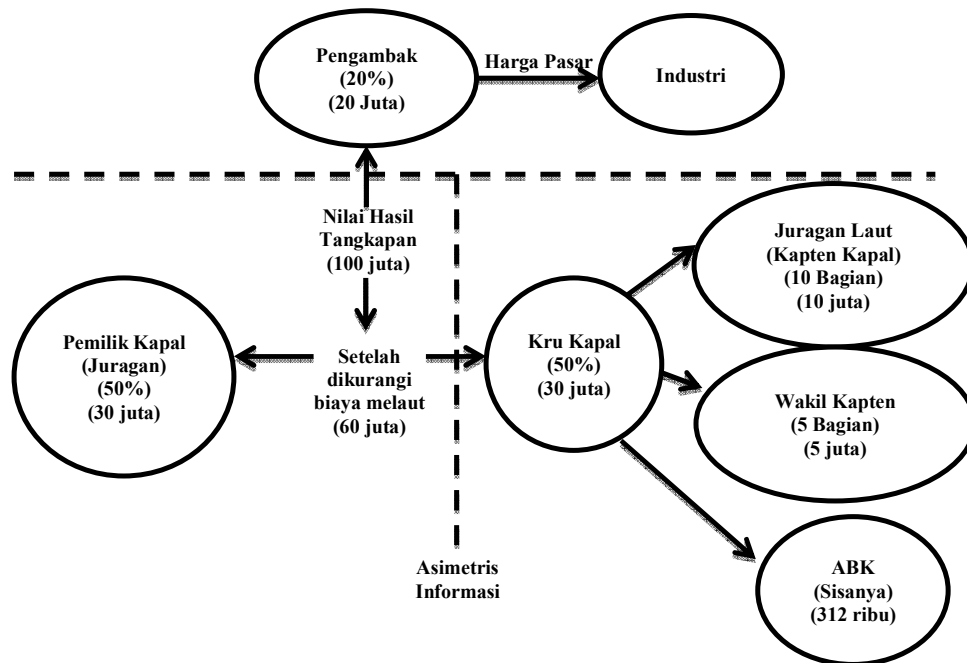
Ketika terjadi penurunan hasil tangkapan ikan lemuru di Muncar tahun 2010-2011, masyarakat dengan latar belakang ABK mengalami dua kondisi kemiskinan sekaligus, yaitu kemiskinan struktural dan kemiskinan musiman. Sebelum terjadi penurunan hasil tangkapan ikan, kemiskinan struktural telah membelit perekonomian masyarakat ABK. ABK telah terjebak dalam sistem kontrak tradisional yang dilakukan juragan kepada mereka. Mengapa peneliti menyebut sistem kontrak tradisional karena dalam mengikat ABK-nya juragan tidak menggunakan *memorandum of understanding* (MOU) kepada ABK melainkan dengan pelepasan pinjaman (uang) sebagai tanda mereka bekerja untuknya. Waktu dan tenaga ABK sepenuhnya dimanfaatkan oleh juragan dengan kompensasi upah yang diberikan sesuai proporsi hasil tangkapan ikan yang didapat. Dari kacamata peneliti, eksploitasi waktu dan tenaga yang dilakukan oleh juragan merupakan biaya tersendiri yang harus ditanggung ABK karena hilangnya oportunitas untuk melakukan kegiatan produktif lainnya. Namun masyarakat ABK ternyata berpandangan lain. Juragan seolah-olah menjadi orang nomor satu dimata mereka karena selain memberikan pinjaman yang tidak bertempo, juraganlah yang menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka.

Gambar 6 menunjukkan sistem bagi hasil pada nelayan di Muncar. Pada gambar diatas ada salah satu pihak yang disebut sebagai pengambak, yaitu seseorang yang memiliki hubungan bilateral dengan pemilik kapal atau juragan. Hubungan bilateral ini sebenarnya berkaitan dengan masalah hutang piutang yang dilakukan pemilik kapal dengan pengambak. Pada dasarnya, sistem hutang piutang yang dilakukan oleh pengambak dengan juragan tidak berbeda antara juragan dengan ABK-nya yaitu tanpa adanya tempo pembayaran. Hal ini menjadi semacam sebuah kontrak unik yang biasa dilakukan oleh masyarakat pesisir Muncar khususnya nelayan untuk mengikat masing-masing pihak dalam hubungan kerja namun dalam kapasitas berbeda. Pengambak juga bisa disebut sebagai investor karena tidak jarang menjadi pihak yang membiayai segala input

dalam melaut, meliputi bahan bakar, penyediaan es balok, konsumsi kru kapal, dan lain sebagainya sehingga pembagian hasil dihitung berdasarkan proporsi nilai hasil tangkapan kapal juragan.

Hubungan bilateral yang dijalin antara juragan dengan pengambak pada akhirnya malah menciptakan asimetris informasi antar keduanya namun dalam hal ini pengambak yang memegang informasi lengkap. Hal ini disebabkan karena dalam hubungan sosial yang terjadi dalam masyarakat pesisir Muncar merupakan representasi struktur sosial yang dipegang kuat oleh komunitas masyarakat setempat. Batasan dari struktur sosial itu sendiri tidak lain adalah sangsi sosial yang diterapkan setiap anggota masyarakat pesisir. Adanya sangsi sosial ini akan menciptakan asimetris informasi yang selanjutnya menjadi batas golongan struktur masyarakat nelayan. Pada gambar 6 terlihat bahwa asimetris informasi menjadi batasan struktur golongan masyarakat nelayan di Muncar yang terbentuk secara alami dan selanjutnya menjadi bagian dari proses pengupahan masing-masing pihak.

Gambar 6: Model Pembagian Hasil Tangkapan *Purse Seine* di Muncar



Sumber: Hasil wawancara, 2012

Jika gambar 6 dideskripsikan dengan nilai hasil tangkapan mencapai 100 juta rupiah, maka pengambak mendapatkan 20% dari total kotor hasil tangkapan yaitu senilai 20 juta rupiah. Setelah dipotong persentase pendapatan pengambak, kemudian nilai hasil tangkapan ikan dipotong dengan biaya input yang digunakan, rata-rata mencapai 20 juta rupiah sekali melaut sehingga sisa nilai produksi 60 juta rupiah.

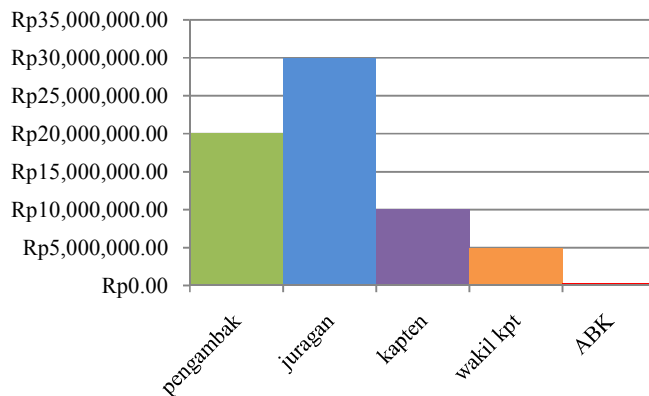
Dari hasil nilai produksi ini, 50% menjadi hak pemilik kapal yaitu senilai 30 juta rupiah dan 50% menjadi hak kru laut. Kru laut sendiri memiliki sistem pengupahan sendiri di mana kapten kapal yang sering disebut sebagai juragan laut memiliki 10 bagian dalam pembagian upah atau senilai 10 juta rupiah. Sedangkan wakil kapten mendapatkan 5 bagian atau senilai dengan 5 juta rupiah. Sisa pembagian hasil tersebut (15 juta rupiah) dibagi merata kepada seluruh ABK. Untuk kapal *Purse Seine* total kru kapal adalah 50 orang termasuk kapten dan wakil kapten sehingga jumlah ABK adalah 48 orang. 15 juta rupiah dari sisa hasil pembagian upah kapten dan wakil kapten tersebut selanjutnya menjadi seluruh upah ABK atau setara Rp 312.500,- per ABK.

Gambar 7 menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan pendapatan sesama kru laut yang berbeda tugas. Pendapatan sebagai ABK hanya 6% dari pendapatan wakil kapten dan hanya 3% dari pendapatan kapten. Perbedaan ini ditentukan oleh kemampuan *softskill* yang dimiliki masing-masing kru karena sebagai kapten dengan upah tinggi bertanggung jawab dalam menentukan daerah tangkapan ikan yang membutuhkan kemampuan dalam membaca kondisi cuaca dan

pergerakan ikan. Wakil kapten sendiri bertugas sebagai koordinator masing-masing tugas yang dibebankan kepada ABK yaitu yang bertanggung jawab di mesin, penyebaran jala, dan penarikan jala.

Menurut informasi dari ABK, status sosial masyarakat dan pengalaman menjadi pertimbangan juragan dalam merekrut seseorang sebagai kapten yang bertanggung jawab sepenuhnya dari hasil tangkapan ikan. ABK sendiri sebenarnya memiliki kemampuan dalam usaha mencari lokasi *fishing ground* namun ABK tidak memiliki status sosial seperti yang dimiliki oleh para kapten kapal. Status sosial inilah yang kemudian menjebak masyarakat ABK sulit untuk keluar dari kondisi miskin secara struktural dan hanya berkuat pada kehidupan dengan tingkat kebutuhan subsisten.

Gambar 7: **Ketimpangan Pendapatan Nelayan**



Sumber: Hasil wawancara (Data diolah)

Selanjutnya kemiskinan musiman yang dialami ABK berkaitan erat dengan menurunnya jumlah pasokan ikan di perairan Selat Bali. Nelayan cenderung melaut di daerah perairan lain termasuk Pancer yang berjarak lebih jauh dibanding dengan Selat Bali. Keadaan ini memaksa ABK menghabiskan waktu dan tenaga dalam usaha penangkapan yang secara ekonomi hilangnya biaya oportunitas tidak ter *cover* oleh upah yang didapatkan ABK. Menurut informasi dari ABK, ketika terjadi penurunan hasil tangkapan ikan pada tahun 2010-2011 pendapatan mereka secara nominal mengalami fluktuasi dan cenderung menurun meskipun sudah melaut sampai di perairan Pancer. Kemiskinan musiman sendiri sebenarnya bersifat sementara namun meskipun kondisi perikanan di Selat Bali pada tahun 2012 sudah mulai mengalami peningkatan ABK kembali dihadapkan pada kemiskinan struktural yang menjebak perekonomian mereka selama ini.

Berbeda halnya dengan ABK, pedagang ikan cenderung memiliki alternatif lain ketika terjadi penurunan tangkapan lemuru. Sebagai pedagang eceran, jenis ikan yang dijual pun beragam, seperti tongkol, sotong, udang, dan jenis ikan lainnya. Di perairan Selat Bali memiliki pola unik hasil tangkapan, yaitu ketika salah satu jenis tangkapan ikan menurun, jenis tangkapan ikan lainnya justru terkadang naik. Hal ini yang menyebabkan pedagang ikan kecil mampu bertahan ketika terjadi penurunan hasil tangkapan lemuru di Selat Bali. Namun jika dibandingkan dengan pendapatan ABK, pendapatan rata-rata pedagang ikan kecil masih jauh dibawah pendapatan ABK pada kondisi normal. Pendapatan maksimal pedagang kecil hanya bisa mencapai Rp 100.000 sedangkan ABK dalam kondisi normal mencapai Rp 300.000 sekali melaut.

Alternatif pekerjaan pedagang ikan yang didominasi wanita ini juga ditunjukkan dengan adanya jenis usaha lain yang mereka kerjakan selama ini. Setiap pedagang ikan banyak melakukan kegiatan produktif lainnya, seperti mengasin, menjual sayuran, dan lain-lain. Bu Syiah yang sudah 20 tahun menjadi pedagang ikan menyatakan bahwa ketika di Muncar pendapatan sebagai pedagang ikan tidaklah banyak, namun masih cukup untuk membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga, khususnya kebutuhan pokok. Meskipun terjadi penurunan hasil tangkapan ikan lemuru, masih ada jenis ikan lainnya yang bisa dijual di pasar. Selain berjualan ikan, Bu Syiah juga melakukan pengasinan ikan, menurut beliau hasil dari pengasinan tidak sebanyak hasil yang didapat dari menjual ikan namun yang terpenting adalah berapapun hasil yang didapat masih ada sesuatu untuk dijual.

Pedagang ikan mendapatkan ikan untuk dijual langsung dari nelayan disekitar pelabuhan yang telah bersandar. Keuntungan rata-rata yang didapat setiap penjualan jenis ikan berbeda namun pada umumnya mereka mengambil keuntungan sebesar Rp 2.000 per jenis ikan yang terjual. Sedikitnya pendapatan jika dibandingkan dengan keuntungan per jenis ikan yang terjual sebenarnya lebih dikarenakan pada terbatasnya modal yang mereka miliki. Pedagang ikan kecil rata-rata hanya mampu mengambil 10 kg ikan dari nelayan dengan ketidak-pastian pasar yang tinggi. Ketika ikan yang dijual laku semua mereka mampu mendapatkan keuntungan yang maksimal, namun ketika ada jenis ikan yang tidak laku biasanya keuntungan habis untuk menutupi kerugiannya.

Dilihat dari kesejahteraan menurut indikator BPS, masyarakat dengan profesi pedagang ikan kecil termasuk golongan masyarakat dengan tingkat kebutuhan subsisten. Meskipun penurunan jumlah ikan lemuru tidak terlalu berpengaruh terhadap profesinya, namun jika dilihat dari tingkat pendapatan cenderung stagnan. Pedagang ikan tidak mampu berkembang, baik dari segi modal maupun pendapatan. Pengeluaran pendapatan untuk kebutuhan rumah tangga juga masih cenderung terhadap pemenuhan kebutuhan pokok.

Terkait masalah usaha pemindangan di Kecamatan Muncar mayoritas pemindangan dikerjakan oleh masyarakat yang memiliki modal. Hal ini dikarenakan panjangnya proses pemindangan tidak mampu dijalankan rumah tangga yang memiliki modal terbatas. Pemindang di Kecamatan Muncar harus memiliki beberapa jumlah karyawan untuk menjalankan usahanya seperti karyawan yang bertugas menangani proses pengepakan, perebusan, dan lainnya. Seperti yang dikemukakan oleh H. Imam Syafi'i selaku pemindang bahwa usaha ini tidak bisa dijalankan dalam skala rumah tangga dengan tingkat modal terbatas. Usaha ini tetap membutuhkan lebih dari 10 karyawan. Mayoritas karyawan bekerja dalam pengepakan, dan hanya beberapa karyawan yang mengerjakan untuk proses perebusan. Jika karyawan kurang dari 10 orang, maka hasil yang didapat tidak akan sesuai dengan pengeluaran usaha, justru terkadang akan mengalami kerugian.

Penurunan hasil tangkapan oleh nelayan pada tahun 2010-2011 ternyata berdampak pada usaha pemindangan yaitu semakin menurunnya dan mahalnya bahan baku dalam usaha ini. Hal ini disebabkan karena nelayan yang melaut sampai di pantai Pancer tidak melakukan pendaratan ikan di pelabuhan Muncar namun langsung mendaratkan ikan di pelabuhan Pancer. Jarak yang terlalu jauh jika harus dibawa ke pelabuhan Muncar memaksa nelayan harus melakukan pendaratan di pelabuhan ini. Selain itu, kualitas ikan jika tidak segera didaratkan akan cepat menurun seiring menurunnya jumlah es balok yang dibawa oleh nelayan. Pancer sendiri tidak memiliki industri untuk mengolah ikan dalam jumlah besar sehingga hasil tangkapan yang didaratkan di pelabuhan Pancer lantas dikirim ke Muncar melalui jalur darat oleh para pengepul ikan dengan menggunakan truk. Semakin jauhnya jarak pengiriman hasil tangkapan membuat harga ikan terus meninggi. Harga ikan tongkol sendiri dalam pasar sudah mencapai Rp 13.000 per kilo.

Sebagai pemindang, Pak Imam Syafi'i sendiri mendapatkan bahan baku (ikan tongkol) dari para pengepul ikan. Menurut beliau, pada tahun 2010-2011 menjadi tahun berat bagi para pemindang karena pada saat itu harga ikan tongkol semakin meninggi. Biaya produksi yang semakin besar tidak jarang memaksa pemindang untuk menghentikan kegiatan produksi seperti yang pernah dialami Pak Imam Syafi'i pada pertengahan tahun 2010. Seluruh karyawan terpaksa di *non*-aktifkan karena bahan baku yang semakin tinggi harganya namun tidak diikuti naiknya harga hasil pindangan. Pada akhir 2010, permintaan pindang dari Surabaya meningkat sehingga Pak Syafi'i mampu menjalankan usahanya kembali meski dengan jumlah produksi yang terbatas.

Pak Suroto sesama pemindang juga merasakan bagaimana beratnya ketika terjadi penurunan hasil tangkapan ikan yang terjadi pada tahun 2010-2011 pada aktifitas usahanya. Kenaikan harga ikan tongkol menyebabkan biaya produksi meningkat namun tidak diikuti naiknya harga pindang di pasar. Pak Suroto pun lebih memilih menghentikan kegiatan produksinya. Penghentian usaha produktif para pemindang berdampak pada menurunnya tingkat pendapatan keluarga karena pemindang di desa Sampangan tidak memiliki kegiatan produktif lain sebagai alternatif masuknya pendapatan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Penghematan pengeluaran yang berarti pengeluaran lebih terfokus dalam usaha pemenuhan kebutuhan pokok terpaksa dilakukan mereka. Selain itu, dampak lain yang ditimbulkan dari penghentian kegiatan pemindangan adalah berhentinya aktifitas kerja karyawan yang mengindikasikan penurunan kegiatan ekonomi masyarakat di desa Sampangan karena sebagian besar karyawan adalah masyarakat desa tersebut.

Pemindang sendiri pada dasarnya adalah masyarakat yang memiliki cukup modal untuk menjalankan usaha ini mengingat usaha pemindangan membutuhkan tenaga karyawan yang cukup banyak. Hal ini yang menyebabkan rumah tangga dengan keterbatasan modal tidak mampu

bersaing dengan pengusaha pemindang yang sudah ada. Dilihat dari kondisi rumah serta fasilitasnya, pemindang yang ada di desa Sampangan adalah orang yang cukup berada. Pemenuhan kebutuhan pendidikan telah menjadi prioritas utama sebagai kebutuhan pokok yang harus dipenuhi sehingga tingkat pendidikan masyarakat dengan latar belakang pemindang sudah mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dilingkungan keluarganya.

## 2) Dampak Sosial

Tajamnya penurunan hasil tangkapan ikan di Selat Bali pada tahun 2010-2011 sama sekali di luar pemikiran masyarakat pesisir khususnya ABK karena pada tahun sebelumnya ikan lemuru sebagai produk utama sangat melimpah dan tidak membuat nilainya turun secara signifikan. Keadaan tersebut membuat sebagian besar masyarakat pesisir dihadapkan pada dua pilihan sulit, antara bekerja atau tidak karena tidak mengantisipasi fenomena ini sebelumnya. Dua pilihan tersebut tentu memiliki konsekuensi masing-masing. Konsekuensi pertama ketika masyarakat memilih tetap bekerja (di sektor perikanan karena tidak memiliki kemampuan lain) maka membutuhkan sumber daya ekstra dalam menjalankannya. Konsekuensi kedua, ketika masyarakat memilih untuk tidak bekerja maka kebutuhan keluarga tidak bisa terpenuhi, sehingga wajar jika masyarakat lebih memilih pilihan pertama meskipun secara ekonomi mengalami kerugian. Namun dari dua pilihan tersebut yang paling merasakan dampak negatif adalah masyarakat yang berlatar belakang sebagai Anak Buah Kapal (ABK) *Purse Seine*.

ABK *Purse Seine* di kawasan pesisir Muncar terikat oleh sistem kontrak kerja yang unik dengan juragannya masing-masing. Setiap ABK diwajibkan memiliki pinjaman dengan juragannya sebagai pengikat kerja agar ABK tidak mudah berpindah dari juragan satu ke yang lainnya. Jika ABK memilih untuk tidak melakukan pinjaman, juragan menganggap ABK tersebut tidak layak untuk dijadikan kru kapalnya mengingat pembagian upah berdasarkan proporsi hasil ikan yang didapatkan. ABK akan cenderung memilih bekerja kepada juragan yang memiliki tangkapan ikan lebih banyak.

Ketika terjadi penurunan ikan di Selat Bali pada tahun 2010-2011, trip melaut nelayan memang sempat mengalami penurunan namun setelah ditemukannya ikan lemuru di perairan Pancer dan perairan lainnya, trip melaut justru ditingkatkan meskipun hasilnya tidak sebanding saat melakukan tangkapan diperairan Selat Bali. Kondisi demikian membuat tenaga dan waktu ABK semakin tereksplorasi sehingga tidak ada kesempatan untuk mencari alternatif kegiatan produktif lainnya. Hilangnya oportunitas ABK menjadi biaya tersendiri yang harus ditanggung ABK karena tidak memiliki alternatif lain atas kontrak sosial yang dilakukan dengan juragannya.

Selain itu, besarnya ketergantungan masyarakat pesisir Muncar terhadap sektor perikanan tangkap membuat cara berpikir masyarakat cenderung sempit dan tidak memiliki keinginan untuk melakukan kegiatan produktif disektor lain. Masyarakat pesisir tidak memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya ikan dengan baik. Masyarakat cenderung hanya menerima keadaan saja tanpa ada upaya untuk mempertahankan keberlanjutan pasokan ikan yang ada di laut. Namun hal ini dianggap wajar oleh peneliti karena ABK dalam bekerja sangat bergantung pada keputusan juragannya. ABK hanya tahu ketika melaut dan mendapatkan ikan maka sudah ada jaminan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. ABK merasa harus bekerja keras karena pendapatan didapatkan dari jumlah tangkapan yang mereka lakukan. Keadaan ini memaksa mereka untuk melakukan pengurusan sumber daya ikan agar upah yang didapat sebanding dengan kerja kerasnya di laut.

*Patron klien* yang terjadi antara ABK dengan juragan membawa dampak pada semakin terbatasnya pola pikir masyarakat ABK terhadap pola pikir alternatif yang seharusnya mereka lakukan guna mengantisipasi penurunan hasil tangkapan. Kebutuhan hidup yang merasa cukup dipenuhi dengan menjadi ABK menjadi salah satu gambaran ketidak-pedulian ABK terhadap eksploitasi yang dilakukan juragannya. Ketidak-pedulian mereka pada dasarnya karena mereka menganggap juragan adalah orang mulia yang rela meminjamkan sebagian uang tanpa ada tempo pengembalian untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang tidak cukup terpenuhi dari pendapatan mereka saat terjadi penurunan hasil tangkapan. Hal ini juga terkait masalah struktur sosial yang terbentuk secara alami seperti yang telah dijelaskan pada gambar 4.12 sebelumnya. Tidak berbeda antara hubungan juragan dengan pengambek, ABK juga menjaga hubungan sosial dengan juragannya agar tidak ada sangsi sosial yang dikenakan juragan terhadapnya. Sebagai masyarakat kelas bawah, ABK tidak ingin terlalu mencampuri urusan dengan masyarakat kelas atasnya (baca: juragan). Semua dipercayakan kepada juragan termasuk dalam sistem pengupahan karena ABK

sendiri tidak tahu-menahu masalah konversi harga yang dilakukan oleh juragannya masing-masing.

Lain halnya dengan ABK, penurunan hasil tangkapan ikan pada tahun 2010-2011 tidak terlalu berdampak pada masyarakat dengan latar belakang pedagang ikan kecil. Hal ini disebabkan karena pedagang ikan kecil membeli ikan secara eceran dengan berbagai jenis kepada nelayan sehingga masih memiliki alternatif ikan yang bisa dijual. Namun hal ini bukan merupakan alternatif kegiatan produktif karena masih bergantung terhadap produksi perikanan tangkap. Pedagang ikan kecil yang didominasi oleh perempuan memang wajar jika tidak memiliki kemampuan lain karena motif mereka dalam menjalankan kegiatan ini adalah membantu menambah pendapatan keluarga.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, sebagian besar pedagang ikan kecil di Muncar juga tidak memiliki kemampuan lain sebagai alternatif kegiatan produktif diluar sektor perikanan. Dilihat dari kondisi dan lingkungan perumahan masyarakat dengan latar belakang pedagang ikan kecil tidak berbeda dengan kondisi perumahan masyarakat dengan latar belakang ABK *Purse Seine*. Kondisi perekonomian rumah tangga juga masih subsisten sedangkan pola hidup bermasyarakat juga tidak menunjukkan perbedaan, misalnya dengan adanya arisan dilingkungan tempat tinggal.

Terkait masalah pemindang yang ada di Kecamatan Muncar, pemindang merupakan golongan masyarakat menengah ke atas yaitu mereka yang memiliki cukup modal untuk menjalankan kegiatan usaha pemindangan. Hasil wawancara terhadap para pemindang di Kecamatan Muncar menunjukkan bahwa kondisi perekonomian masyarakat dengan latar belakang pemindang sudah memiliki tabungan yang cukup untuk mengantisipasi lesunya usaha pemindangan ketika terjadi penurunan hasil tangkapan ikan oleh nelayan. Pemindang pun sebenarnya memiliki cukup modal untuk melakukan kegiatan produktif diluar sektor perikanan. Tapi meskipun memiliki cukup modal untuk menjalankan kegiatan usaha di luar pemindangan, namun sekali lagi ketidak-inginan untuk melakukan usaha disektor lain menjadi alasan mengapa tingkat ketergantungan masyarakat pesisir terhadap sektor perikanan tangkap sangat tinggi. Hasil yang didapat dari sektor perikanan ternyata mampu membuai masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan produktif disektor lain.

Usaha pemindangan sendiri pada dasarnya merupakan usaha turun temurun sehingga setiap keturunan dari keluarga pemindang sudah dibekali pengetahuan menjalankan usaha ini sejak dini. P. H. Imam Syafi'i dan Pak Suroto mengaku kalau sejak masih sekolah sudah diajari bagaimana melakukan usaha pemindangan dari orang tuanya sehingga beliau tahu semua proses pemindangan dari pengolahan hingga pemasaran. Menurut beliau, usaha ini sendiri sebenarnya bukanlah usaha yang rumit mengingat proses pemindangan bisa dilakukan secara tradisional dan sebagian masyarakat Muncar bisa melakukannya. Kendala yang sering dihadapi oleh masyarakat adalah permodalan dan pemasaran karena banyak pemindang yang menutup usahanya karena tidak memiliki akses pasar yang baik. Selain itu, hubungan sosial dengan karyawan juga menentukan kelangsungan usaha ini berjalan karena jika karyawan sudah nyaman bekerja kepada juragannya secara materi dan sosial, maka karyawan tersebut tidak akan berpindah ke juragan lainnya.

Menurut P.H.Imam Syafi'i dan Pak Suroto, hasil yang didapatkan dari usaha ini cukup besar apalagi ketika hasil tangkapan nelayan melimpah. Hal ini yang membuat beliau enggan melirik usaha lain karena terlalu beresiko jika tidak memiliki pengalaman terhadap usaha yang akan dijalani. Pemindang lebih baik menghentikan usahanya untuk sementara ketika biaya produksi (harga ikan tongkol) tidak bisa ditutupi oleh hasil yang didapat. Dari pengalaman beliau, selama pemindang memiliki akses pemasaran yang baik, penutupan usaha bersifat sementara atau paling lama dua bulan untuk menunggu harga pindang di pasar naik.

### **Upaya Masyarakat Pesisir terhadap Penurunan Hasil Tangkapan**

Penurunan hasil tangkapan berdampak pada menurunnya pendapatan yang diterima nelayan pandega yang berdampak semakin sulitnya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Seperti yang telah disampaikan oleh Pak Sugeng sebelumnya, tidak jarang juragan menjadi alternatif utama untuk melakukan pinjaman ketika penghasilan dari melaut dirasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Jadi terkait dengan upaya yang dilakukan nelayan pandega ketika terjadi penurunan hasil tangkapan pada tahun 2010-2011, upaya untuk melakukan kegiatan produktif lainnya tidak ada, upaya yang dilakukan hanya sebatas memenuhi kebutuhan rumah tangga dari pinjaman yang dilakukan terhadap juragannya maupun menjual aset berharga seperti perhiasan ataupun aset lain yang dianggap mempunyai nilai.

Terkait dengan usaha pemindangan, pemindang cenderung menghentikan kegiatan usahanya untuk sementara waktu ketika nilai hasil produksi tidak sebanding dengan nilai jual ikan pindang di pasar. Pemindang sendiri tidak memiliki alternatif kegiatan produktif lain meskipun mereka tergolong pihak yang memiliki modal. Pemindang hanya memiliki kemampuan untuk menjalankan usahanya saat ini dan tidak berminat untuk melakukan kegiatan produktif lainnya karena anggapan bahwa usaha pemindangan saja sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Sebagai pedagang ikan kecil dan nelayan kecil, penurunan hasil tangkapan ikan di Muncar tahun 2010-2012 tidak menghentikan kegiatan produktif yang mereka lakukan saat ini. Pedagang ikan kecil dalam menjual ikan tidak berdasarkan satu jenis ikan saja namun beberapa jenis hal ini yang menyebabkan penjual ikan masih bertahan untuk melakukan kegiatan produktifnya sebagai pedagang ikan kecil. Sama halnya dengan pedagang ikan kecil, nelayan kecil juga cenderung lebih fleksibel dalam melakukan tangkapan karena pada dasarnya nelayan kecil tidak bergantung pada satu jenis ikan saja. Ketika ada jenis hasil laut tertentu yang memiliki nilai jual maka nelayan kecil akan memilih untuk melakukan penangkapan pada jenis hasil laut tersebut. Hal itu terbukti dari data jumlah produksi ikan laut di Muncar bahwa pada tahun 2011, ubur-ubur menjadi komoditas utama perairan Selat Bali khususnya di Muncar.

### **Tanggapan Masyarakat terhadap Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi**

Sebelum terjadi penurunan hasil tangkapan ikan pada tahun 2010-2011, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi melalui Dinas Kelautan dan Perikanan sering melakukan kegiatan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat pesisir Muncar agar memiliki pengetahuan dalam memanfaatkan sumber daya ikan di Selat Bali. Pelatihan kerja baik yang bertujuan sebagai diferensiasi kegiatan produktif *non* perikanan maupun sebagai standar operasional prosedur kegiatan produktif perikanan juga telah sering dilakukan. Namun sampai sejauh ini tidak mampu merubah cara berpikir empiris masyarakat pesisir Muncar, oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengungkap fenomena apa yang terjadi di tengah masyarakat mengenai upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi selama ini.

Dari hasil wawancara informan dengan latar belakang ABK, pedagang ikan, dan pemindang, peneliti menemukan keseragaman informasi berkaitan dengan efisiensi penyuluhan dan pelatihan yang telah dilakukan pemerintah daerah. Bagi sebagian ABK yang menjadi informan dalam penelitian ini tidak pernah mengetahui adanya penyuluhan dan pelatihan yang dilakukan pemerintah daerah beberapa tahun terakhir ini, namun sempat ada bantuan peralatan yang diberikan pemerintah daerah melalui Koperasi Unit Desa (KUD) daerah setempat. KUD yang ada di wilayah pesisir Muncar sendiri hanya satu, yaitu di Desa Sampangan yang bertugas melakukan pemasaran terhadap hasil tangkapan nelayan. Menurut informasi dari beberapa ABK tersebut, alat yang diturunkan melalui KUD tidak sampai ditangan nelayan bahkan mengendap di KUD itu sendiri. Hal ini disebabkan karena tidak ada sosialisasi khusus yang dilakukan aparat desa terhadap nelayan dan sistem birokrasinya yang rumit sehingga banyak alat yang tidak sampai di tangan nelayan.

Tidak ada pelatihan dari pemerintah yang dirasakan oleh ABK selama ini, bahkan ketika memberikan bantuan berupa alat tidak ada sosialisasi terlebih dahulu dan pengawasan langsung sehingga sering disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Bagi masyarakat yang berlatar belakang pedagang ikan kecil, beberapa mengaku pernah ada pelatihan dari pemerintah terkait masalah usaha pengasinan. Pengetahuan pedagang ikan kecil tentang teknik pengasinan didapat dari pelatihan ini sehingga selain bisa berdagang, mereka memiliki kemampuan dalam usaha pengawetan ikan. Namun mereka tidak pernah mengetahui adanya pelatihan kerja yang dilakukan pemerintah daerah terkait masalah kegiatan produktif *non* perikanan. Sejauh ini yang mereka dapatkan adalah pelatihan pengolahan ikan dan pengawetan saja. Namun bagi sebagian pedagang ikan kecil yang menjadi informan dalam penelitian ini menyatakan bahwa tidak pernah mendengar adanya pelatihan dan bantuan dari pemerintah daerah seperti yang dirasakan oleh Pak Nurhaini dan Bu Sukati. Mereka tidak pernah mendengar adanya kegiatan pemerintah yang ditujukan para pedagang ikan apalagi bantuan-bantuan dari pemerintah untuk pedagang ikan kecil seperti mereka.

Lain halnya dengan pedagang ikan kecil, masyarakat dengan latar belakang pemindang memang pernah mendapatkan pelatihan dari pemerintah daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi. Pelatihan yang didapatkan adalah standar operasional prosedur (SOP) dalam kegiatan usaha pemindangan. Namun apa yang didapatkan para informan dari pelatihan ini sebenarnya sudah dipahami dan dilakukan oleh mereka dalam menjalankan usaha



pemindangan. Pelatihan yang dilakukan pemerintah bukanlah hal yang baru karena selama ini pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah sebenarnya juga telah dilakukan oleh pemindang yang ada di wilayah pesisir sehingga ketika ada pelatihan bagi pemindang, mereka enggan mengikuti pelatihan tersebut.

Selain dari pelatihan SOP, pemindang tidak pernah mengetahui adanya pelatihan kegiatan usaha *non* perikanan dari pemerintah daerah. Bantuan alat dan permodalan juga tidak pernah mereka dapatkan dari pemerintah selama mereka menjalankan usaha pemindangan ini. Dari hasil wawancara dengan Pak Untung Slamet selaku pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi, selama ini penyuluhan dan pelatihan kerja sering dilakukan pemerintah di wilayah pesisir Muncar. Menurut beliau, memang informasi dari pemerintah daerah masih kurang diterima seluruh masyarakat wilayah pesisir Muncar, hal ini dikarenakan tenaga penyuluh terbatas sehingga tidak semua masyarakat pesisir mendapatkan penyuluhan dan pelatihan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi.

### **Upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Menyikapi Penurunan Hasil Tangkapan Ikan di Muncar**

Sektor perikanan sampai saat ini masih menjadi sektor unggulan di Kabupaten Banyuwangi sehingga perlu adanya upaya pelestarian agar tetap terjaga kelangsungan sumber daya ikan, khususnya di perairan Selat Bali. Selain itu, naik-turunnya hasil tangkapan sebenarnya sudah diantisipasi oleh pemerintah sejak masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada tahun 1984 Muncar dijadikan Daerah Kerja Khusus Perikanan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 15 tahun 1984. Selanjutnya pada tahun 1993 berubah menjadi Badan Pengelola Pangkalan Pendaratan Ikan (BPPPI) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 Tahun 1993. Pada tahun 2004, sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 12/MK/2004, Muncar ditingkatkan statusnya menjadi Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai (UPPPP), (UPT PPP Muncar, 2012).

Tugas pokok dari Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pantai adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan UPPPP, memberikan bimbingan dan pembinaan kepada nelayan atau bakul, pengolah hasil perikanan dan menyusun statistik dengan petunjuk dan kebijakan yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan kegiatan UPPPP sesuai dengan uraian tugas dan berdasarkan kepada perundang-undangan yang berlaku.
3. Melaksanakan pengamanan, pengawasan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur.

Sedangkan fungsi dari Unit Pengelola Perikanan Pantai (UPPPP) adalah sebagai berikut:

1. Pusat pengembangan masyarakat nelayan
2. Tempat berlabuh perahu / kapal perikanan
3. Tempat pendaratan ikan hasil tangkapan
4. Tempat untuk memperlancar kegiatan perahu / kapal perikanan
5. Pusat penanganan dan pengolahan hasil perikanan
6. Pusat pemasaran dan distribusi ikan hasil tangkapan
7. Pusat pelaksanaan pembinaan mutu hasil perikanan
8. Pusat pelaksanaan penyuluhan dan pengumpulan data perikanan
9. Pusat pengawasan penangkapan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya ikan

Selain itu, melalui Dinas Kelautan dan Perikanan dan berdasarkan Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang perikanan, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah menempuh upaya – upaya guna melindungi lingkungan perairan, diantaranya melakukan:

1. Penyuluhan dan pembinaan untuk mencegah usaha penangkapan ikan yang menggunakan alat tangkap dan bahan yang dapat merusak dan membahayakan kelestarian perikanan.
2. Pemantauan dan penanggulangan pencemaran akibat aktivitas transportasi laut, industri, rumah tangga, dan lain-lain melalui kerjasama lintas sektor.

3. Pemulihan stok ikan pada perairan umum yang kritis dilakukan melalui penebaran benih ikan di sungai-sungai, waduk dan rawa.
4. Penyuluhan dan pembinaan ekosistem hutan bakau, serta penanaman kembali hutan bakau yang mengalami penggundulan.
5. Mengadakan tindakan preventif dan kuratif yaitu dengan menggelar operasi penertiban dan pengawasan Selat Bali yang melibatkan instansi terkait.
6. Mengalokasikan adanya kawasan laut lindung (*Fish Sanctuary*) di daerah Kayu Akin Kecamatan Tegaldlimo.
7. Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) telah terbentuk diwilayah pesisir mulai dari Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, Kabat, Rogojampi, Muncar, Tegaldlimo, Grajagan, Purwoharjo, dan Pesanggaran. Wilayah tersebut berfungsi dalam membantu aparat informan apabila diidentifikasi ada tindak pelanggaran perikanan. Pengawasan dan penertiban dilakukan 38 kali dalam setahun seperti Pembentukan Kelompok (*Stakeholder*) yang Peduli Lingkungan (PSBK).

### **Kaitan Hasil Penelitian dengan Kerangka Pikir**

Kerangka pikir dalam penelitian ini membandingkan kesejahteraan ekonomi rumah tangga perikanan sebelum dan sesudah terjadinya penurunan hasil tangkapan ikan. Kesejahteraan ekonomi dapat diukur salah satunya dari tingkat pendapatan masyarakat, di mana tingkat pendapatan menggambarkan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing rumah tangga perikanan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dari hasil penelitian terlihat bahwa pada umumnya masyarakat mengalami penurunan pendapatan setelah terjadi penurunan hasil tangkapan. Masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan diantaranya adalah masyarakat yang berlatar belakang sebagai ABK dan pemindang, sedangkan untuk pedagang ikan kecil cenderung lebih memiliki alternatif lain karena penjual ikan kecil tidak menjual ikan hanya satu jenis saja namun ada beberapa jenis ikan yang dijual dalam waktu yang bersamaan.

Alternatif pekerjaan baru sangat berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia masyarakat pesisir. Pada umumnya, masyarakat pesisir tidak memiliki kemampuan lain selain apa yang ditekuni saat ini. Masyarakat pada dasarnya lebih memilih bekerja di sektor perikanan karena penghasilannya yang tinggi sehingga terkadang tidak berniat menggeluti bidang usaha lain. Hal ini terlihat dari para pemindang yang memiliki cukup modal untuk melakukan diferensiasi usaha namun tidak berniat melakukan usaha di sektor lain. Hasil dari pemindang cukup menghambat pemikiran tersebut mengingat hasil yang didapat dari usaha pemindangan cukup tinggi. Bagi para pemindang, penurunan hasil tangkapan ikan yang terjadi tahun 2010-2011 merupakan penghambat kegiatan usaha saja namun tidak cukup untuk merubah pemikiran para pemindang untuk melakukan diferensiasi usaha. Mereka cenderung memilih menghentikan kegiatan usaha untuk sementara waktu menunggu harga pindang dipasar cukup untuk menutupi biaya produksi.

Lain halnya dengan ABK *Purse Seine* di Muncar. Mereka tidak memiliki alternatif pekerjaan lain karena terikat dalam kontrak kerja yang secara tradisional diterapkan oleh para juragan. ABK diwajibkan memiliki pinjaman uang kepada juragannya sebagai pengikat kontrak. Penurunan pasokan ikan yang ada di Selat Bali justru menaikkan trip melaut nelayan setelah ditemukannya pasokan ikan lemuru melimpah di perairan Pancer dan sekitarnya meskipun tidak sebanyak di Selat Bali. Tenaga dan waktu ABK dimanfaatkan penuh oleh juragan untuk melaut sampai di perairan Pancer. Pendapatan yang diterima juga tidak sebanyak ketika melaut di Selat Bali karena input yang digunakan untuk melaut lebih tinggi sehingga pemotongan pendapatan dari juragan juga lebih tinggi. Pemotongan disini diartikan sebagai harga ikan yang dikenakan oleh juragan untuk mengonversi setiap bagian ikan yang menjadi hak ABK sebagai upah. Terikatnya ABK dengan juragan membuat ABK tidak memiliki alternatif kegiatan produktif disektor lainnya.

Penurunan hasil tangkapan yang terjadi pada tahun 2010-2011 ternyata juga tidak cukup mampu merubah pola pikir para pedagang ikan kecil. Penurunan hasil tangkapan yang terjadi lebih kepada jenis ikan lemuru dan ikan pelagis lainnya. Pedagang ikan membeli ikan kepada nelayan dengan eceran hal ini menunjukkan bahwa ikan yang dijual oleh pedagang ikan kecil lebih bervariasi, tidak hanya ikan jenis lemuru dan tongkol saja, sehingga tidak terlalu berdampak pada kegiatan produktif mereka. Pola pikir pedagang ikan sebenarnya hampir mirip dengan pemindang yaitu pendapatan yang dihasilkan dari usaha berdagang ikan menurut mereka cukup lumayan sehingga mereka tidak memiliki pemikiran lain untuk melakukan kegiatan produktif lainnya.

Selama ini pemerintah telah melakukan kegiatan pelatihan kepada masyarakat agar tidak bergantung hanya pada sektor perikanan tangkap. Melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah menyelenggarakan beberapa pelatihan-pelatihan, diantaranya adalah pelatihan budidaya ikan air tawar. Namun hal ini tidak bisa sepenuhnya efektif diterapkan karena pada dasarnya mayoritas masyarakat rumah tangga perikanan adalah mereka yang tingkat kebutuhan rumah tangga subsisten. Mereka tidak memiliki modal yang cukup untuk menjalankan usaha budidaya ikan darat terkait masalah tempat, harga pakan dan bibit yang masih tergolong tinggi serta masa budidaya yang dianggap terlalu lama. Hal ini menyebabkan kebutuhan rumah tangga sehari-hari menjadi tidak terpenuhi.

Selain itu, pemerintah kurang adanya sosialisasi secara merata kepada masyarakat pesisir ketika akan menyelenggarakan penyuluhan dan pelatihan. Hal ini terlihat dari pernyataan sebagian informan khususnya ABK dan pedagang ikan kecil yang merasa tidak pernah mendengar adanya pelatihan ataupun penyuluhan dari pemerintah terutama ketika terjadi penurunan hasil tangkapan ikan yang terjadi di Muncar beberapa tahun terakhir ini. Sebagian informan juga pernah mengetahui dan mengikuti pelatihan yang diadakan pemerintah, namun menganggap kegiatan tersebut tidak efisien dan memberi pengetahuan baru bagi masyarakat pesisir karena materi yang digunakan dalam pelatihan sebenarnya sudah dilakukan oleh masyarakat dalam melakukan kegiatan produktifnya.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka kesimpulan yang bisa di dapat adalah sebagai berikut:

1. Penurunan hasil tangkapan ikan di Muncar sangat dirasakan mereka yang berlatar belakang sebagai nelayan pandega kapal *purse seine* dan pemindang yaitu berkurangnya pendapatan nelayan pandega dan mahalnya biaya produksi bagi pemindang. Sedangkan untuk pedagang ikan kecil dan nelayan kecil penurunan hasil tangkapan ikan tidak berpengaruh terhadap profesinya. Hal ini dikarenakan pedagang ikan kecil menjual ikan tidak bergantung pada satu jenis ikan saja sedangkan nelayan kecil dengan kapasitas terbatas cenderung mencari hasil laut yang memiliki nilai jual tidak bergantung pada satu jenis ikan saja.
2. Sampai saat ini nelayan pandega masih tidak memiliki alternatif kegiatan produktif lainnya karena waktu dan tenaga digunakan sepenuhnya untuk bekerja kepada juragannya. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka lebih memilih untuk menjual barang-barang rumah tangganya atau melakukan pinjaman kepada juragan. Bagi nelayan kecil dan pedagang kecil penurunan hasil tangkapan tidak mempengaruhi kegiatan produktifnya sehingga ketika terjadi penurunan hasil tangkapan ikan mereka tetap melakukan aktivitas yang sama. Untuk pemindang cenderung menghentikan kegiatan produksinya menunggu harga ikan pindang dipasar mampu menutupi biaya produksi.
3. Terkait masalah upaya pemerintah, selama terjadi penurunan hasil tangkapan ini nelayan pandega tidak mengetahui adanya tidakan pemerintah daerah. Namun bagi pemindang, pelatihan memang sering diadakan oleh pemerintah namun terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan pemindang saja. Hal ini dirasa tidak efisien mengingat pemindang sendiri dalam menjalankan usahanya sudah menjalankan seperti SOP sehingga mereka merasa tidak ada pengetahuan baru dalam pelatihan yang dilakukan pemerintah selama ini.
4. Dari kacamata Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi, pelatihan sering diadakan di kawasan pesisir Muncar untuk mengantisipasi penurunan hasil tangkapan ikan. Namun ketidak-merataan informasi dalam pengadaan pelatihan juga disadari karena hanya pada golongan tertentu saja biasanya pelatihan ditujukan.

### Saran

Dari hasil pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka peneliti mengajukan beberapa saran yang mungkin bisa menjadi bahan rujukan baik bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagai penentu kebijakan daerah, masyarakat pesisir Muncar

sebagai pihak yang memanfaatkan hasil perikanan tangkap, maupun pihak akademisi yang ingin mencoba mengungkap fenomena yang terjadi ditengah masyarakat pesisir Muncar terkait dalam pemanfaatan sumber daya hayati ikan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia mutlak dilakukan melalui kegiatan penyuluhan agar masyarakat yang selama ini memanfaatkan sumber daya hayati ikan dengan pola pikir dan kepercayaan yang mereka anut selama ini cenderung membawa kondisi perikanan laut kearah deplisi dan masyarakat pesisir Muncar menjadi lebih bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya hayati ikan yang terkandung di perairan Selat Bali.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Bayuwangi melalui instansi-instansi dibawahnya harus menyosialisasikan secara merata ketika akan menyelenggarakan penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat pesisir Muncar. Pelatihan yang dilakukan juga harus dikaji ulang seberapa besar tingkat efisiensinya bagi masyarakat pesisir.
3. Dalam memberikan bantuan, hendaknya penyaluran bantuan dari pemerintah daerah kepada masyarakat pesisir harus diawasi secara tuntas dari hulu sampai hilir agar tidak memicu tindakan *moral hazard* yang sering terjadi di instansi bawahnya.
4. Masyarakat pesisir khususnya masyarakat dengan tingkat kebutuhan ekonomi subsisten harus mulai mempertimbangkan untuk melakukan kegiatan produktif lainnya di luar sektor perikanan sebagai antisipasi ketika hasil tangkapan tidak mampu mencukupi kebutuhan ekonomi rumah tangga.
5. Harus dibentuk persatuan seluruh ABK *Purse Seine* di Muncar karena selama ini juragan cenderung mengeksploitasi tenaga dan tidak transparan kepada para ABK terkait masalah pengupahan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. 1989. *Hasil Survei Biaya Hidup Tahun 1989*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2011. *Kondisi Sosial Ekonomi Rumah Tangga Sektor Perikanan*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bintarto. 1989. *Interaksi Desa-Kota dan Permasalahannya*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Banyuwangi. 2012. *Data Kependudukan Kabupaten Banyuwangi 2011*. Banyuwangi: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Banyuwangi. 2011. *Keadaan Geografis dan Topografi Kabupaten Banyuwangi*. Banyuwangi: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Banyuwangi. 2011. *Keadaan Umum Perikanan Tangkap Kabupaten Banyuwangi*. Banyuwangi: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Banyuwangi. 2011. *Perkembangan Produksi Perikanan dan Kelautan serta Pengaruhnya*. Banyuwangi: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Banyuwangi. 2011. *Upaya Perlindungan Lingkungan Perairan Kabupaten Banyuwangi*. Banyuwangi: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi.
- Fauzi, Akhmad. 2004. *Ekonomi Sumber Daya Alam: Teori dan Aplikasi*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama.
- Fauzi, Akhmad. 2005. *Kebijakan Perikanan dan Kelautan: Isu, Sintesis, dan Gagasan*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Gunawan, Ikhsan. 2010. *Motivasi Kerja Guru Tidak Tetap di Berbagai SMA Swasta di Kota Semarang*. [Skripsi]. Jakarta. Universitas Diponegoro.
- Hannesson, Rognvaldur. *Ekonomi Perikanan Suatu Pengantar*. Terjemahan oleh Masri Maris. 1988. Universitas Indonesia. UI-Press.
- Hartanto, Arif Dwi. 2010. *Peran Modal Sosial (Social Capital) Dalam Pengembangan Koperasi Melalui Pengelolaan Sistem Tanggung Renteng (Studi Pada Koperasi Wanita Serba Usaha Bhakti Asta Makmur di Kota Malang, Jawa Timur)*. [Skripsi]. Malang. Universitas Brawijaya

- Inaya, I. 2004. *Pendugaan hasil Tangkapan Ikan Lemuru yang Didaratkan di PPI Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur*. [Skripsi]. Bogor. Institut Pertanian Bogor
- Kristina, Anjar et.al. 2010. Faktor Penyebab Turunnya Sumber Daya Laut. [Karya Tulis]. Malang. Universitas Negeri Malang
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Ekonomi Pembangunan:Teori, Masalah dan Kebijakan*. Yogyakarta. UPP AMP YKPN.
- Marahudin, Firial dan Ian R. Smith. 1987. *Ekonomi Perikanan*. Jakarta. PT. Gramedia
- Moleong, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung. Remaja Rosda Karya.
- Nasikun. 1996. *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga*. Yogyakarta. PT. Tiara Wacana.
- Nazir. 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta. Ghalia Indonesia
- Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar. 2009. *Jumlah Produksi per Jenis Ikan Tahun 2009*. Muncar: UPT PPP Muncar
- Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar. 2010. *Jumlah Produksi per Jenis Ikan Tahun 2010*. Muncar: UPT PPP Muncar
- Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar. 2011. *Jumlah Produksi per Jenis Ikan Tahun 2011*. Muncar: UPT PPP Muncar
- Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar. 2012. *Jumlah Produksi per Jenis Ikan Tahun 2012*. Muncar: UPT PPP Muncar
- Purwaningsih, Ratna et.al. 2012. Pengembangan Model Simulasi Kebijakan Pengelolaan Ikan Berkelanjutan. *Jurnal Teknik Industri*. Vol. 14. No.1, Juni 2012 hal. 25-34.
- Reksohadiprodjo, Sukanto. 1993. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Energi*. Yogyakarta. BPFE Yogyakarta.
- Rusmali, Kemal. 2004. *Analisis Aktivitas Pendaratan dan Pemasaran Hasil Tangkapan dan Dampaknya terhadap Sanitasi di Pelabuhan Perikanan Samudera Jakarta, Muara Baru DKI Jakarta*. [Skripsi]. Bogor. Institut Pertanian Bogor.
- Setiyono dan Satmoko Yudo. 2008. Dampak Pencemaran Lingkungan akibat Limbah Industri Pengolahan di Muncar (Studi Kasus Kawasan Industri Ikan di Muncar, Banyuwangi). *JAI*. Vol. 4 No. 1
- Soemokaryo, Soepanto. 2001. *Model Ekonometrika Perikanan Indonesia*. Malang. Agritek
- Suparmoko. 1994. *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Edisi 2*. Yogyakarta. BPFE UGM.
- Sutikno dan Maryunani. 2006. *Ekonomi Sumber Daya Alam*. BPFE Unibraw. Malang
- Tarigan, Robinson. 2005. *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
- Yustika, Ahmad Erani. 2004. *Perekonomian Indonesia: deskripsi, preskripsi, dan kebijakan*. Malang. Bayumedia.

#### **Sumber Pustaka Publikasi Elektronik**

- Dawud. 2010. Perbedaan Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. <http://www.berkarya.um.ac.id>. Diakses: 26 November 2012
- Lestari, I dan Budisantoso Wirjodirdjo. 2010. *Analisis Kesejahteraan Pelaku Industri Pengolah Ikan pada Komunitas Klaster Masyarakat Nelayan Pesisir: Sebuah Pendekatan Dinamika Sistem*. [Skripsi]. Surabaya. Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). <http://dosen.narotama.ac.id/wp-content/uploads/2012/03/Analisis-Kesejahteraan-Pelaku-Industri-Pengolahan-Ikan-Pada-Komunitas-Klaster-Masyarakat-Nelayan-Pesisir-Sebuah-Pendekatan-Dinamika-Sistem.pdf>. Diakses: 22 Oktober 2012 di
- Porter, Gareth. 2001. *Fisheries Subsidies and Overfishing: Towards a Structured Discussion. United Nations Environment Programme*. [http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=gareth%20porter%20fisheries%20subsidies%20overfishing%20and%20trade&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.unep.ch%2Fetu%2Fftp%2Ffacts%2Fcapblid%2Frdtwo%2Ffe\\_vol\\_1.pdf&ei=2sJ8UKCHK4zjrAf994HoCA&usq=AFQjCNFJvIrfOFDIRukh0UkwrwckT6R1Xg](http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=gareth%20porter%20fisheries%20subsidies%20overfishing%20and%20trade&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.unep.ch%2Fetu%2Fftp%2Ffacts%2Fcapblid%2Frdtwo%2Ffe_vol_1.pdf&ei=2sJ8UKCHK4zjrAf994HoCA&usq=AFQjCNFJvIrfOFDIRukh0UkwrwckT6R1Xg). Diakses: 14 Maret 2012.